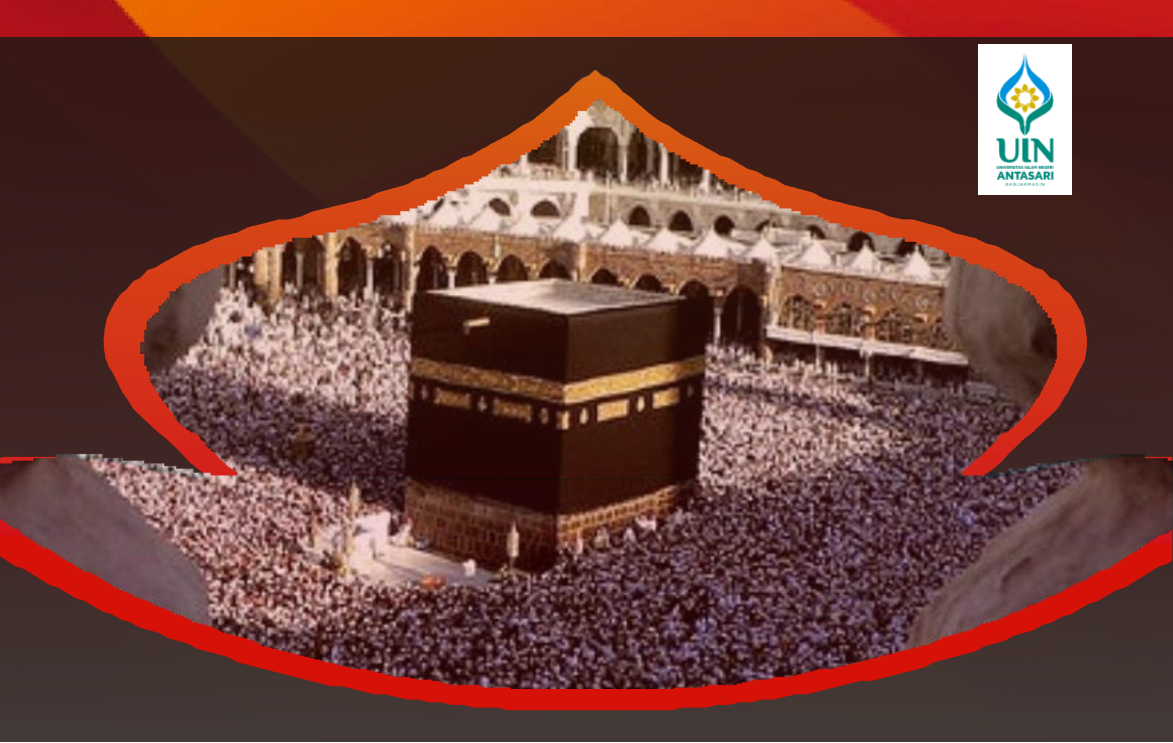




Implementasi Instrumen Evaluasi Pembelajaran **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM** di Sekolah

(Studi Kasus Pada Kelas Inklusi se-Kalimantan Selatan)

Dr. H. Yahya Mof, M.Pd.

**IMPLEMENTASI INSTRUMEN EVALUASI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI SEKOLAH
(STUDI KASUS PADA KELAS INKLUSI SE KALIMANTAN
SELATAN)**

Dr. H. Yahya MOF, M.Pd.



TAHUN 2021

**IMPLEMENTASI INSTRUMEN EVALUASI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI SEKOLAH
(STUDI KASUS PADA KELAS INKLUSI SE KALIMANTAN
SELATAN)**

Copyright© 2021

xii + 89, ukuran 15,5 x 23 cm

Penyusun :

Dr. H. Yahya MOF, M.Pd.

Layout:

Tim Kreatif Zahir

Desain Cover :

Tim Kreatif Zahir

Diterbitkan Oleh:

Antasari Press

Jl. A.Yani KM.4,5 Banjarmasin

Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua siswa. Sekolah inklusi perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran di kelas dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang wajib ada dan diikuti oleh seluruh siswa di setiap jenjang. Pembelajaran PAI di kelas inklusi merupakan serangkaian perangkat pembelajaran PAI yang terorganisasi secara rapi dan teratur, serta berinteraksi dan berinteraksi dalam proses pembelajaran PAI untuk siswa inklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi instrumen evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi se Kalimantan Selatan. Jenis penelitian adalah penelitian evaluasi yang menggunakan metode kualitatif, dibangun berdasarkan paradigma naturalistik (post-positivistik).

Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Oktober 2018. Penelitian ini dilakukan pada 44 Sekolah Piloting yang ditetapkan pemerintah daerah dan memiliki kelas-kelas inklusi di wilayah Kalimantan Selatan. Sumber data dalam penelitian ini dipilih dalam konteks penelitian sesuai dengan fokus dan kebutuhan analisis data. Peneliti menggunakan in-depth interview, yaitu wawancara mendalam yang tidak terstruktur ketat. Observasi dilakukan secara terus terang dan tersamar. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yaitu dokumen mengenai profil sekolah, data peserta didik, foto-foto, dan sebagainya. Pengembangan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi disesuaikan dengan kisi-kisi indikator temuan yang telah dibangun.

Hasil penelitian antara lain adalah sebagai berikut. (1) Ada beberapa sekolah inklusi di Kalimantan Selatan sudah cukup baik dalam menjalankan program inklusi yang merupakan kebijakan pemerintah, yang memiliki siswa ABK dan telah didukung sarana dan prasarana yang sudah diperbantukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah inklusi masih perlu terus ditingkatkan dari seluruh aspek guna mendukung terlaksanakannya program pendidikan di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan optimal. (2) Instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi secara umum masih belum ada dibuat oleh guru PAI. Hal ini tentu terkait dengan kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum umum. Sehingga para guru PAI masih menggunakan perangkat RPP dan penilaian dengan menggunakan kurikulum umum tanpa dimodifikasi. Perlu dilakukan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran PAI modifikasi melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi/IHT/workshop/ bimtek. (3) Secara umum belum tersedianya raport khusus siswa ABK. (4) Keunikan pembelajaran di kelas inklusi, ada siswa percaya dirinya tinggi dengan ingin ikut paskibra, ada yang tergolong slowlearner dengan perlu perhatian khusus untuk guru, ada siswa yang hiperaktif sampai mengganggu pembelajaran, ada yang memiliki emosional tinggi sehingga mengakibatkan permasalahan dengan siswa reguler, ada yang memiliki kepribadian dan tutur kata lebih sopan dan santun dibanding siswa reguler, ada yang memiliki bakat dan sangat senang bidang olahraga. Keunikan-keunikan pembelajaran di kelas inklusi membuktikan pentingnya program pendidikan inklusi yang harus ditingkatkan, khususnya pada pembelajaran PAI di kelas inklusi. Perlunya kerjasama berbagai pihak untuk melakukan penanganan yang benar.

Kata Kunci: Instrumen Evaluasi, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Kelas Inklusi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur, selalu kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Implementasi Instrumen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah (Studi Kasus pada Kelas Inklusi se Kalimantan Selatan)” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam, kami sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Kami merasa perlu untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tersusunnya laporan penelitian yang sedang ada di hadapan para pembaca sekalian, kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil. Ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut kami sampaikan kepada berbagai pihak berikut ini.

1. Rektor UIN Antasari yang telah memberikan persetujuan terhadap pemberian bantuan dana DIPA UIN Antasari untuk penelitian ini.
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) beserta seluruh staf yang telah memberikan bantuan serta fasilitas dalam penyelesaian laporan penelitian ini.
3. Sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK/MA yang memiliki kelas inklusi di wilayah Kalimantan Selatan yang berkenan menjadi lokasi pengambilan data.
4. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini hingga selesai.

Kami selaku penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang kami miliki, tentu saja laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun, serta arahan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan penelitian ini.

Banjarmasin, Desember 2021

Ketua Peneliti

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN
PUBLIKASI ILMIAH (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN

Al-hamd li Allâh, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., proses penelitian 2018 yang dilengkapi dengan sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi, pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para pihak yang terlibat dalam proses ini, baik admin, reviewer, pejabat terkait, maupun para peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan penelitian dengan sistem online melalui Litapdimas, yang memang menjadi program unggulan subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai perpanjangan tangannya, LP2M berupaya untuk menerapkan harapan-harapan dari sistem baru ini. Memang, sebagai sistem baru, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti proses review, NIDN, dan sebagainya. Namun, kendala-kendala itu bisa diatasi dengan kerja sama dan kordinasi, baik pihak LP2M dengan subdit, maupun juga dengan peneliti. Oleh karena itu, kami menyampaikan dan mengapresiasi atas kerja samanya ini sehingga proses penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2021 ini, tercatat 57 proposal yang masuk, dan 46 di antaranya dinyatakan

lulus dan diterima untuk dibiayai dari dana penelitian yang seluruhnya berasal BOPTN. Pada awal pelaksanaan ini, meski masih pada tahap percobaan, LP2M berupaya untuk memenuhi standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses seleksi, misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi dengan aplikasi berbayar (*Quetext*) demi menjamin terciptanya iklim akademis di UIN Antasari yang bebas dari plagiasi, termasuk dalam hal penelitian. Upaya ini seiring dengan akan diprosesnya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di kampus ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah menerapkan *double blind review*, di mana setiap proposal dibaca tanpa mengetahui nama pengusul oleh dua orang reviewer. Review dilakukan pada dua tahap, yaitu review substantif tentang isi proposal yang dilakukan oleh reviewer nasional dan reviewer internal, serta review afirmatif yang terkait dengan pertimbangan nilai-nilai strategis proposal, seperti dari aspek signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan program strategis UIN, *track record* peneliti, nilai etis, dan sebagainya, yang direview oleh reviewer afirmatif dari pejabat terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik secara substantif maupun administratif, LP2M juga telah dan akan tetap melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti dengan sosialisasi dan pengarahan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 ini mengangkat tema-tema yang beragam dari pengusul fakultas-fakultas di UIN Antasari. Sebagian besar penelitian ini mengangkat tema pendidikan Islam, sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi Islam, tafsir, sejarah, paham dan gerakan radikal, dan keperpustakaan. Isu tentang integrasi ilmu juga diangkat dari penelitian tahun ini.

Sebagian besar dari penelitian ini telah memenuhi harapan misi UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan global. Akan datang, seiring dengan disusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar visi integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan diharapkan lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. Isu integrasi ilmu pada tahun ini hanya diangkat oleh sedikit dari penelitian ini, sedangkan sebagian besar membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isu-isu kependidikan. Idealnya, secara teoretik, isu-isu lokal yang diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global oleh para peneliti, sehingga isu-isu lokal tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang lokal, melainkan juga oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena itu, LP2M tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan metodologi untuk memperkaya perspektif. Di antara masukan reviewer terkait proposal yang diajukan adalah masih minimnya pengetahuan tentang teori-teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, serta minimnya pengetahuan tentang riset-riset monomental dan mutakhir di bidangnya.

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah merampungkan tugasnya ini dengan baik. Kami menaruh harapan sebagai berikut. Pertama, tetaplah memberikan perhatian terhadap penelitian yang merupakan salah aspek pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini dengan mengajukan proposal dan melakukan penelitian untuk menyahuti kepentingan penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkannya sebagian berbasis dari hasil penelitiannya.

Kedua, dengan rampungnya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagai penggunanya, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, dengan melakukan diseminasi atau diskusi hasil riset, baik di kalangan terbatas di lingkungan kampus maupun secara luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca secara luas, baik dalam bentuk cetak maupun online. Begitu juga, hasil riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan lebih lanjut dan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian yang berkualitas dan hasilnya yang bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat ini bisa terwujud secara nyata menuju UIN Antasari yang semakin maju. *Âmîn yâ rabb al-‘âlamîn*.

Banjarmasin, 10 November 2021

Wardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH (LP2M)	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Kajian Pendidikan Inklusi	7
B. Kajian PAI di Kelas Inklusi	11
C. Kajian Evaluasi Pembelajaran	16
D. Hasil Penelitian yang Relevan	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Waktu dan Tempat Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Jadwal Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
F. Kebijakan Program Pendidikan Inklusi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	29
G. Sumber Daya Manusia dalam Melaksanakan Program Pendidikan Inklusi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	42
H. Implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah inklusi se	

Kalimantan Selatan.....	52
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman dan atau keterampilan tertentu. Artinya, pendidikan dapat dilakukan tanpa mengenal batas usia, ruang dan waktu. Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan kegiatan dan bentuk, aktifitas apapun yang berguna untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tertentu¹.

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berbudaya dan berkarakter. Pendidikan harus menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendidikan yang berkualitas, tak terkecuali pendidikan yang diselenggarakan secara khusus untuk mencetak generasi bangsa yang ditakdirkan sebagai anak atau siswa yang berkebutuhan khusus dan mereka masuk ke sekolah-sekolah normal, sehingga kelas yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus disebut dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi atau pembelajaran inklusi mengacu pada inklusi atau pengajaran untuk SEMUA anak dalam lingkungan belajar formal atau non-formal

1 Lilik Maftuhatin, Prodi. Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang RELIGI, Vol. V, No. 1 Volume 6, Nomor 2, Oktober 2014.

tanpa mempertimbangkan gender, intelektual, sosial, emosi, linguistik, budaya, agama, atau karakteristik lainnya.²

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh tenaga pengajar. Sebab, adanya kurikulum yang selama ini didesain dengan mengabaikan prinsip universal desain membuat implementasi kurikulum cenderung kaku dan non-adaptif terhadap kebutuhan siswa. Adapun kaitannya dengan pendidikan inklusi sebenarnya dimaksudkan agar desain pelaksanaan pendidikan dapat diterapkan kepada seluruh siswa yang sudah pasti memiliki keberagaman dalam berbagai aspek kemampuan dan berbagai latar belakang, baik fisik, psikis, motorik, sensorik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini, kemampuan guru dalam melakukan berbagai modifikasi metode, media, dan juga evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengukur jarak antara kurikulum yang non-adaptif dengan kondisi siswa yang beragam untuk mewujudkan terlaksananya suatu sistem pembelajaran yang inklusi.

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pada Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya.”

Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mewujudkan penyelenggaraan pendidikan

2 Jamisten Situmorang, “Pendidikan Inklusi”, dari <https://jamisten.wordpress.com/2008/12/10/pendidikan.inklusi>, diakses pada 10 Maret 2021.

yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua siswa. Pendidikan inklusi mengakomodasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya tanpa mengacuhkan kelainan yang dialaminya³, dimana pendidikan inklusi memfasilitasi kelainan anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti pendidikan seperti anak pada umumnya.

Sekolah inklusi perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran di kelas dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Jika sekolah tersebut memakai kurikulum umum maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan anak pada umumnya, jika sekolah memakai kurikulum modifikasi maka pelaksanaan evaluasinya pun disesuaikan dengan kesepakatan sekolah tersebut. Dan jika memakai kurikulum yang diindividualisasikan maka pelaksanaan evaluasinya pun tergantung kesepakatan guru dan anak.

Aspek evaluasi pendidikan, sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur capaian program pembelajaran sangatlah penting. Sebab, dari rincian hasil belajar yang telah dicapai, akan didapatkan suatu landasan untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk itu, program evaluasi pembelajaran harus mendapatkan perhatian sebanyak pelaksanaan program pembelajaran itu sendiri. Sebab, apabila hasil evaluasi pembelajaran tidak dapat menjelaskan kondisi obyektif dari siswa, maka tujuan dari pendidikan itu sendiri akan tidak tercapai atau bahkan cenderung merugikan pihak tertentu, dalam hal ini adalah siswa⁴.

3 Latifa Garnisti Rifani (2016), "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta", Skripsi, UNY, Yogyakarta.

4 Hendro Sugiyono Wibowo (2015).

Berbagai macam bidang atau mata pelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik di kelas, membuat sistem pembelajaran pada suatu mata pelajaran akan berbeda dengan sistem pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang wajib ada dan diikuti oleh seluruh peserta didik di setiap jenjang, minimal dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah umum (SMU) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Adapun sistem pembelajaran PAI dalam *setting* inklusi merupakan serangkaian perangkat pembelajaran PAI yang terorganisasi secara rapi dan teratur, serta berinteraksi dan berinteraksi dalam proses pembelajaran PAI untuk peserta didik inklusi⁵. Tujuannya agar dapat menuntaskan tujuan pembelajaran PAI dengan kompetensi yang diharapkan, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik inklusi dalam mata pelajaran PAI secara optimal pada kelas inklusi se Kalimantan Selatan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi evaluasi pembelajaran PAI di sekolah (studi kasus pada kelas inklusi se Kalimantan Selatan).

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari fokus masalah di atas, maka pernyataan yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Berfokus pada kebijakan program pendidikan inklusi pada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

3 Ani Mar'atul Hamidah, Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Setting Inklusi di SDN Lemahputro 1 Sidoarjo, Didaktika Religia Volume 3, No. 2, Tahun 2015.

1. Berfokus pada sumber daya manusia dalam melaksanakan program pendidikan inklusi pada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Berfokus pada implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah inklusi se Kalimantan Selatan yang meliputi hal-hal berikut ini.
 - a. Mendeskripsikan instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi.
 - b. Mendeskripsikan proses implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi.
 - c. Mendeskripsikan keunikan pembelajaran di kelas-kelas inklusi yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian pengembangan ini adalah mendeskripsikan tentang implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah (studi kasus pada kelas inklusi se Kalimantan Selatan). Secara khusus tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi instrumen evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi se Kalimantan Selatan yang meliputi hal-hal berikut ini.

- 3 Mendeskripsikan instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi.
- 4 Mendeskripsikan proses implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi.
- 5 Mendeskripsikan keunikan pembelajaran di kelas-kelas inklusi yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut.

- 3 Sebagai masukan bagi pemerintah untuk melakukan tidak lanjut penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah yang dijadikan *piloting*.
- 4 Sebagai masukan bagi sekolah inklusi terhadap penerapan instrumen evaluasi PAI dan proses pembelajaran di kelas inklusi, dalam skala yang lebih luas.
- 5 Sebagai masukan bagi para pelaksana pendidikan inklusi untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesionalitas yang produktif, serta masukan bagi guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran kelas inklusi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pendidikan Inklusi

1. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan, oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Anak dengan gangguan belajar spesifik yaitu anak yang mengalami gangguan dalam memproses pembelajaran secara spesifik seperti sulit membaca, menulis dan berhitung. Menurut Yuyus anak berkesulitan belajar adalah gangguan neorologis yang dapat dialami oleh orang dewasa dan anak-anak bukan dari kecacatan, kesulitan ini bersifat biologis yang terutama diakibatkan oleh lambannya kematangan atau tidak efektifnya fungsi bagian otak tertentu dan mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.⁶

Anak-anak yang mengalami gangguan belajar, lamban belajar (*slow learner*) mereka ini adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah anak pada umumnya, sedangkan anak tunagrahita memiliki IQ berkisar 80-85. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), anak lamban belajar adalah anak yang memilki potensi

⁶ Yuyus, *Adaptasi Pembelajaran Siswa Berkesulitan Belajar* (Bandung: Rizqi, 2005), 5.

intelektual sedikit dibawah anak pada umumnya.⁷ Sedangkan menurut Bandi, anak lamban belajar adalah anak yang berprestasi rendah karena mereka memiliki IQ sedikit rendah dibanding dengan anak pada umumnya sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.⁸

Secara umum rintangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua katagori yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat kelainan tertentu, dan anak-anak yang berkelainan yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Setiap anak yang memiliki hambatan temporer maupun permanen memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor lingkungan, (2) faktor dalam diri anak sendiri, dan (3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Sesuai kebutuhan lapangan maka pada penelitian ini hanya dibahas secara singkat pada kelompok anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer.

Anak berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri dan kebutuhan pembelajarannya, maka seharusnya pemerintah, guru dan yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi pendidikan inklusi merapatkan barisan guna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan. Terutama menyangkut tentang model evaluasi pembelajaran bagi anak bekebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

7 Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 13.

8 Bandhi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. (Bandung: Aditama, 2006), 24.

2. Kelas Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu/integrasi. Pada pendidikan inklusi anak dilayani sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua berusaha untuk dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, prasarana dan sarana, guru, sistem pembelajaran sampai dengan sistem evaluasi pembelajarannya. Pendidikan inklusi juga tidak fokus pada pendidikan di sekolah tetapi mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, non formal lainnya karena proses pendidikan anak tidak berhenti dan tidak cukup di sekolah saja.

Secara konseptual model pendidikan inklusi menjanjikan sejumlah keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, hal ini dimungkinkan karena anak dapat memperoleh pendidikan pada sekolah manapun yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Di sisi lain, model pelayanan pendidikan seperti ini juga dianggap lebih efisien karena tidak perlu mendirikan sekolah khusus bagi mereka. Pendidikan Inklusi juga memungkinkan anak untuk belajar sosial dan emosi secara lebih wajar. Di sisi lain model ini juga akan mendorong siswa lain yang normal untuk belajar menghargai dan menerima anak-anak dengan kekurangan tersebut⁹.

Menurut Juang Sunanto dalam tulisannnya yang berjudul Pendidikan yang Terbuka untuk Semua, menyebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah: “Pendidikan yang memberikan pelayanan kepada setiap anak tanpa terkecuali”. Pendidikan

⁹ Smith J. David (2006), *Inklusi Sekolah ramah Untuk Semua*, (terj.) Sugiarmmin. Bandung: Nuansa.

yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, social, emosi, ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, suku, budaya, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersma-sama, baik di kelas formal maupun sekolah non formal, yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak¹⁰.

Dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.

Melalui pendidikan inklusi diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya. Tujuannya adalah agar tidak ada khusus dapat memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Tujuan dari semua upaya menuju pendidikan inklusi adalah kesejahteraan anak berkebutuhan khusus baik secara *permanen* maupun *temporer* untuk memperoleh pendidikan dan segala haknya sebagai warga negara. Sedangkan apakah penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler saat ini benar-benar baik bagi kesejahteraannya, hal ini membutuhkan waktu untuk membuktikannya, tetapi kita dapat percaya itu akan terjadi selama mereka diberi kesempatan dan dukungan

10 Juang Sunanto, "Media Dunia Disabilitas", *Diffa* (14 Februari 2012).

yang tepat sebagaimana dirancang bagi mereka. Hingga saat ini yang tampak pasti adalah jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah telah meningkat, sehingga target untuk mewujudkan pendidikan untuk semua pada tahun 2015 tampaknya menjadi lebih realistis¹¹.

Menurut kementerian pendidikan nasional, bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai berikut; prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip kebutuhan individual, prinsip kebermaknaan, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan¹². Karakteristik pendidikan inklusi memerlukan penyesuaian dan fleksibilitas di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, pengajaran, sosial, perilaku dan budaya. Kaitannya dengan proses pembelajaran pelaksanaan pendidikan inklusi disesuaikan dan fleksibel dengan hal-hal sebagai berikut; kurikulum, pendekatan dan proses pembelajaran, serta sistem evaluasi.

B. Kajian PAI di Kelas Inklusi

1. Kurikulum PAI Kelas Inklusi

Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah regular yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi dapat diartikan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi/materi.¹³ Kurikulum PAI selalu menitik beratkan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor

11 Lilik Maftuhatin, Prodi. Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang RELIGI, Vol. V, No. 1 Volume 6, Nomor 2, Oktober 2014.

12 Kementerian Pendidikan Nasional, *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusi* (Jakarta: Kemendiknas, 2010).

13 Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB). (2010). *Pedoman Manajemen dan Pembelajaran Sekolah Inklusi*. Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional.

yaitu pengetahuan, penghayatan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pengamalan nilai-nilai aqidah, akhlak (moral/etika) dan bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Komponen pengembangan kurikulum sekolah inklusi antara lain adalah; (1) menetapkan standar komponen dan kompetensi dasar, (2) menyusun silabus, (3) menetapkan

Kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran. Komponen tersebut harus disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusi, baik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maupun Kurikulum 2013.

Menurut Dr. Sutji Harijanto bahwa model kurikulum sekolah inklusi adalah; (1) duplikasi kurikulum berdasarkan tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata/regular seperti siswa tunanetra, tunarungu, wicara, tunadaksa, dan tunalaras dengan tetap memodifikasi proses pembelajaran yang sesuai, (2) modifikasi kurikulum dengan menyesuaikan kurikulum siswa rata-rata/regular dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi ABK, seperti tunagrahita, gifted and talented (eskalasi), (3) substitusi kurikulum dengan memperhatikan beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara dengan melihat situasi dan kondisi siswa ABK, (4) omisi kurikulum yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak-anak regular.¹⁵

14 Nik Haryati. (2011). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Bandung. Alfabeta.

15 Aidan Rohail. Kurikulum dan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). www.kurikulum-dan-pendidikan-inklusi-bagi.html. Diakses tanggal 7 Juni 2021.

Kurikulum yang digunakan tersebut harus menyesuaikan dengan siswa ABK. Kurikulum akademik dapat dipilah menjadi; (1) anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi, (2) anak dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/vokasional, (3) anak dengan kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri.

Selain itu, perlu disiapkan kurikulum kompensatoris, yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisasi barrier pada setiap ABK sebelum belajar aspek akademik di kelas inklusi. Kurikulum program layanan kompensatoris dirumuskan oleh tim ahli atau guru khusus sesuai dengan jenis kelainan siswa, gradasi berat ringannya kondisi siswa serta kesiapan sekolah inklusi.

2. Materi PAI Kelas Inklusi

Materi PAI adalah segala sesuatu yang akan diberikan kepada siswa untuk dipahami, dihayati serta diamalkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Materi yang diberikan kepada siswa kelas inklusi sangat universal dan mengandung aturan berbagai aspek kehidupan, berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunah. Secara umum dasar, materi PAI berkenaan dengan Keimanan (aqidah), Islam (syariah), ihsan (akhlak).

Materi PAI di kelas inklusi harus disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Bagi siswa ABK yang memiliki intelegensi diatas normal, materi dapat diperluas atau diperdalam dengan menambah materi baru yang harus disesuaikan dengan bakat. Siswa ABK yang memiliki intelegensi relatif normal dapat dipertahankan atau diturunkan tingkat kesulitannya.

Sedangkan siswa ABK yang memiliki integensi di bawah normal (tunagrahita/anak lamban belajar) maka materi PAI dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya dengan disesuaikan dengan kemampuan siswa, atau bisa dihilangkan beberapa bagian tertentu.¹⁶

3. Pelaksanaan Pembelajaran PAI Kelas Inklusi

Pelaksanaan pembelajaran PAI kelas inklusi diperlukan berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah tenaga pendidik, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran di kelas inklusi.

- a. Tenaga pendidik kelas inklusi (guru mata pelajaran, wali kelas, Guru Pendidik Khusus (GPK), guru bantu). Yang perlu diperhatikan adalah dalam manajemen pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antara guru pembimbing dengan guru reguler. Guru reguler bertanggung jawab dalam pembelajaran bagi semua siswa, sedangkan guru pembimbing khusus bertanggung jawab memberikan layanan pembelajaran bagi ABK di kelas inklusi. Bagi GPK dengan latar belakang sarjana pendidikan luar biasa, berperan sebagai pendamping, dan bekerja sama dengan guru mata pelajaran PAI, dan wali kelas dalam memberikan asesmen, menyusun program pengajaran individual. Selain itu, GPK memberikan layanan kekhususan dan layanan pendidikan bagi ABK yang mengalami hambatan dalam pembelajaran akademik. Guru mata pelajaran PAI juga harus telah

¹⁶ Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. Jogyakarta: Ar Ruzz Media.

mendapatkan pelatihan yang memadai tentang layanan pendidikan bagi ABK.¹⁷

- b. Metode pembelajaran PAI kelas inklusi, secara umum menggunakan metode pembelajaran yang digunakan kelas pada umumnya, seperti metode hiwar (percakapan), metode kisah qur'ani dan nabawi, metode amtsal, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode dengan mengambil ibrah (pelajaran) dan mauidhah (peringatan), dan metode taghrib dan tarhib (membuat takut). Metode pembelajaran PAI kelas inklusi perlu dimodifikasi dengan mengacu pada metode pembelajaran PAI pada umumnya, serta pemilihan strategi khusus yang tepat bagi siswa ABK yang disesuaikan dengan gaya belajar dan materi yang diajarkan. Selain itu, perlu diperhatikan dalam komunikasi, analisis tugas, instruksi langsung, bantuan.
- c. Media pembelajaran PAI kelas inklusi, secara umum tentu mengacu pada media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran di kelas regular. Namun dalam pemilihan media pembelajaran PAI kelas inklusi perlu dipertimbangkan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK yang ada dikelas regular tersebut. Siswa ABK memiliki kategori kekhususan diantaranya dengan gangguan penglihatan (media audio), pendengaran (media cetak/gambar), fisik, dan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata (jenis multi media dan benda konkrit).

17 Ismail. (2011). Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. Semarang. Media Group.

C. Kajian Evaluasi Pembelajaran

1. Hakekat Evaluasi Pembelajaran

Pendidikan merupakan input dari hasil yang diinginkan sesuai tujuan yang ditetapkan melalui proses kegiatan yang disengaja. Oleh karena itu, pendidikan harus dievaluasi hasil yang telah dicapai yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Definisi evaluasi yaitu sebagai suatu proses sistematis dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Selain itu, evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan.

UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I pasal 1 ayat 17 dikemukakan bahwa “penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik”.

Ralph Tyler (dalam Suharsimi Arikunto, 2012) menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Grondlund dan Linn (1990) mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran.

Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Indikator keefektifan itu dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa. Perubahan tingkah laku yang terjadi itu dibandingkan dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan isi program pembelajaran. Oleh karena itu, instrumen evaluasi harus dikembangkan bertitik tolak kepada tujuan dan isi program, sehingga bentuk dan format tes yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan karakteristik bahan ajar serta proporsinya sesuai dengan keluasan dan kedalaman materi pelajaran yang diberikan. Hasil evaluasi harus dianalisis dan ditafsirkan secara hati-hati sehingga informasi yang diperoleh betul-betul akurat mencerminkan keadaan siswa secara objektif. Informasi yang objektif dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan proses dan program selanjutnya.

Evaluasi dalam pembelajaran tidak semata-mata untuk menentukan rating siswa melainkan juga harus dijadikan sebagai teknik atau cara pendidikan. Sebagai teknik atau alat pendidikan evaluasi pembelajaran harus dikembangkan secara terencana dan terintegratif dalam program pembelajaran, dilakukan secara kontinue, mengandung unsur paedagogis, dan dapat lebih mendorong siswa aktif belajar.

2. Evaluasi Pembelajaran Kelas Inklusi

Evaluasi pembelajaran dapat diartikan sekumpulan komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang saling berkolaborasi didalam membuat program perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi yang dilaksanakan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi untuk membantu guru dalam menempatkan dalam kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-

masing serta membantu guru dalam menyusun rencana evaluasi, menentukan waktu pelaksanaan dan melaporkan hasilnya yang tidak membuat kesenjangan antara kenyataan dan harapan.

Proses pelaksanaan evaluasi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku disekolah tersebut, jika sekolah tersebut memakai kurikulum umum maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan anak pada umumnya, jika sekolah memakai kurikulum modifikasi maka pelaksanaan evaluasinya pun disesuaikan dengan kesepakatan sekolah tersebut. Dan jika memakai kurikulum yang diindividualisasikan maka pelaksanaan evaluasinya pun tergantung kesepakatan guru dan anak.

Terdapat tujuh penilaian yang dapat digunakan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Selain itu, ada penilaian tertulis yang biasa digunakan pada sekolah-sekolah dan sudah lazim digunakannya. Penilaian tertulis yaitu penilaian yang digunakan secara tertulis dengan tes tertulis. Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu: Soal dengan memilih jawaban serta soal dengan mensuplai jawaban.

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian pendidikan terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian terdiri atas penilaian eksternal dan penilaian internal. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melaksanakan proses pembelajaran. Penilaian eksternal

dilakukan oleh suatu lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang dimaksudkan untuk penegnadalian mutu. Adapun penilaian internal adalah penilaian yang dilakukan dan direncanakan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung dalam rangka penjaminan mutu.

3. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas Inklusi

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab suci al-Qur'an dan hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman diikuti tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa¹⁸.

Evaluasi pembelajaran merupakan penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum¹⁹. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat hasil belajar siswa. Hasil evaluasi yang diperoleh melalui berbagai teknik evaluasi, maka selanjutnya hasil evaluasi digunakan untuk kepentingan pengelolaan siswa dan untuk kepentingan perbaikan program. Evaluasi merupakan penilaian tentang suatu aspek yang dihubungkan dengan situasi aspek lainnya, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh yang ditinjau dari

18 Heri Gunawan (2012), "Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", Bandung: Alfabeta, 201.

19 Harjanto (2006). *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta. Rineka Cipta.

beberapa segi.²⁰ Sasaran PAI adalah kemampuan siswa yang meliputi; sikap, dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya, serta sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri sebagai hamba Allah, anggota masyarakat, serta sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Evaluasi PAI berupa kognitif, psikomotor, dan afektif. Pengetahuan siswa dievaluasi melalui penilaian tes tertulis, tes lisan, dan penugasan dan diberi skor dengan rentang ketuntasan minimal 70. Psikomotor dan afektif dievaluasi melalui hasil observasi dengan rubrik penilaian psikomotor dan afektif dengan kategori baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran PAI, melatih siswa untuk berpikir kritis dengan memecahkan masalah dengan menghubungkan materi yang diperoleh untuk diterapkan dengan permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari siswa.

Evaluasi pembelajaran PAI kelas inklusi harus disesuaikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Kemampuan siswa yang dikelompokkan ke dalam kelompok reguler, reguler modifikasi dan individual. Kelompok reguler adalah siswa yang tidak mempunyai hambatan secara akademik 0-50% mata pelajaran PAI, kelompok reguler modifikais adalah siswa yang mempunyai hambatan secara akademik 50-70% mata pelajaran PAI, dan kelompok individual adalah siswa yang mempunyai hambatan secara akademik pada 70-90% mata pelajaran PAI. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI kelas inklusi melalui tes tertulis, tes lisan, tes praktek, dan

20 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta. Kencana Prenada Media.

sikap. Tes tertulis/tes lisan, tes praktek dapat dilaksanakan pada setiap kompetensi dasar mata pelajaran PAI. Selain itu juga pada UTS, UAS dan UN yang disesuaikan dengan kondisi siswa ABK di sekolah inklusi.

Siswa ABK kelompok regular penilaian dilaksanakan melalui tes tertulis disamakan dengan siswa lainnya dikelas, dengan penambahan waktu 20 menit dari batas yang tertera dalam lembar soal. Selain itu, pada kondisi khusus siswa ABK diberi soal dengan *font* huruf soal tes diperbesar dan dilaksanakan di ruangan tersendiri atau meja tersendiri menghadap dinding di dalam kelas untuk mengurangi distraksi. Siswa diingatkan untuk tetap tenang, membaca soal secara berulang dan perlahan-lahan, dan tetap mengerjakan soal apabila terlihat melamun atau hilang konsentrasi. Untuk mempertahankan konsentrasi, siswa diperbolehkan untuk memakai alat bantu yang tidak mengganggu siswa lain dan yang telah direkomendasikan oleh tenaga ahli seperti penggunaan headphone jika diperlukan.²¹

Siswa ABK kelompok regular modifikasi, soal tes tertulis yang sudah dibuat oleh guru PAI harus dimodifikasi oleh guru pendamping (yang berlatar belakang S1 Pendidikan Luar Biasa). Soal modifikasi yang sudah direview tersebut dengan menebalkan dan atau menggarisbawahi kata kunci, menyederhanakan kalimat soal, mengurangi jumlah soal, mengurangi tingkat kesulitan soal, dan menerjemahkan tulisan menjadi soal gambar. Sedangkan siswa ABK kelompok individual, soal tes dimodifikasi secara fleksibel sesuai dengan materi yang dipelajari sesuai kurikulum yang digunakan. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi siswa ABK di kelas inklusi.

21 Educational Support Department (2010). *Handbook 2009-2011*.

Kelulusan siswa ABK di kelas inklusi dibagi menjadi tiga yaitu jalur regular (siswa mengikuti tes sama dengan siswa regular lainnya sesuai dengan standar pendidikan nasional yang berlaku, tanpa melalui adaptasi cara tanpa adaptasi isi), jalur regular modifikasi (siswa mengikuti tes yang sama dengan yang lainnya dengan melakukan beberapa modifikasi terhadap soal yang diberikan), dan jalur individual (siswa mengikuti tes tersendiri dengan program dan materi yang telah dipelajari). Laporan tertulis tentang hasil evaluasi dan penilaian PAI di kelas inklusi dituangkan dalam raport siswa secara umum seperti halnya siswa regular. Namun perlu ditambahkan raport narasi yang telah disesuaikan bagi siswa ABK.

Selain itu, pemantauan terhadap perkembangan belajar siswa berkebutuhan khusus juga perlu dilakukan melalui pencatatan hasil kerja siswa (format/bahan penilaian atas pelaksanaan KBM yang telah dilakukan guru dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi siswa). Sistematika perumusan format penilaian dibuat sederhana dan semudah mungkin untuk dapat dimengerti oleh orang tua dan guru agar tidak terjadi kesalahpahaman atau diskriminasi pada siswa. Pencatatan hasil kerja siswa meliputi; LKS, catatan aktivitas siswa (berupa buku dan rekaman gambar atau video).

Evaluasi pembelajaran PAI dilakukan untuk mengetahui tingkatan kemajuan suatu kegiatan proses belajar mengajar di kelas inklusi. Dalam sistem ini, hal-hal yang dibahas meliputi proses perekrutan input, klasifikasi tenaga pendidik, proses pembelajaran (tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi) yang tercakup dalam kurikulum, lingkungan pendidikan, output, serta faktor pendukung (sarana prasarana dan dana).

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Sukmawati (2014) melaporkan bahwa hasil pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus secara umum nilainya berada di atas rata-rata dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) = 70. Hanya beberapa ABK dengan kategori tunagrahita berat yang memperoleh nilai sama bahkan di bawah standar minimal. Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran PAI pada anak berkebutuhan khusus di SD Islam Al Azhaar telah berhasil²².

Rohmah (2010) membuktikan bahwa model pembelajaran PAI untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah model pembelajaran berbasis kompetensi anak dengan mengembangkan lingkungan belajar secara terpadu antara prinsip-prinsip umum dan khusus dalam pembelajarannya²³.

Maftuhatin (2014) melaporkan bahwa evaluasi pembelajaran sudah cukup bagus karena guru sudah menerapkan dua metode dalam evaluasi yaitu dengan soal yang disamakan dengan reguler dan yang kedua dengan soal sesuai dengan kebutuhan mereka, disertai dengan portofolio yang mencatat perkembangan mereka selama pembelajaran²⁴.

Sedangkan temuan Haryono, dkk (2015) mengungkapkan bahwa melalui penilaian sistem akreditasi pendidikan inklusif, bahwa manajemen komponen pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Tengah umumnya dinilai kategori C (skor total = 24-43) dan tidak terakreditasi (skor total = <24). Sementara

22 A. Sukmawati (2014). "Pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus di SD Islam Al Azhaar Tulungagung". Skripsi.

23 Rohmah Siti Mamah (2010). *PAI dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Tesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.

24 Lilik Maftuhatin, Prodi. Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang RELIGI, Vol. V, No. 1 Volume 6, Nomor 2, Oktober 2014.

itu, akreditasi sekolah SLB di Jawa Tengah umumnya diberi peringkat kategori B (total skor 44-63).²⁵

Hasil penelitian Sunanto (2009) menunjukkan bahwa (1) jumlah ABK di Sekolah Dasar inklusif bervariasi dari 1 sampai 4 anak. Sedangkan jumlah siswa antara 20 dan 46. Pada umumnya kelas yang memiliki siswa ABK gurunya lebih dari satu. (2) rata-rata indeks inklusi sebesar 38,58 dengan indeks ideal 54. (3) indeks inklusi yang tinggi dicapai di kelas yang memiliki guru lebih dari satu, gurunya sering mengikuti pelatihan penanganan ABK, siswa ABK lebih banyak, dan jumlah siswa keseluruhan lebih sedikit.²⁶

Penelitian Kurniasari, Desi (2017) melaporkan bahwa Model evaluasi CIPP pada program pembelajaran PAI kelas VIII pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo adalah sebagai berikut: (1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) meliputi identifikasi peserta didik inklusif yang dilakukan dengan mengobservasi anak ketika pembelajaran, baik pada anak reguler maupun pada anak inklusif, (2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) meliputi penyusunan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, (3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) meliputi proses belajar mengajar sesuai dengan program pembelajaran, (4) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) meliputi diteruskan atau tidaknya program pembelajaran.²⁷

25 Haryono, dkk. (2015). *Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2015.

26 Juang Sunanto (2009). *Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang terdapat ABK di Sekolah Dasar*. Jurnal JASSI; Anakku, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2009.

27 Desi Kurniasari, Januari 2017, *Evaluasi Program Pembelajaran PAI pada Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo*, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul ini “Implementasi Instrumen Evaluasi Pembelajaran PAI di Sekolah (Studi Kasus pada Kelas Inklusi se Kalimantan Selatan)” merupakan penelitian evaluasi yang menggunakan metode kualitatif, dibangun berlandaskan paradigma naturalistik (post-positivistik).

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah (studi kasus pada kelas inklusi se Kalimantan Selatan) terutama di 44 Sekolah Piloting yang memiliki kelas-kelas inklusi. Penelitian ini peneliti berusaha memahami subjek melalui kerangka berpikir sendiri, seperti halnya kaidah penelitian kualitatif yang disampaikan oleh Denzin dan Lincoln²⁸.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Oktober 2018 yang terbagi menjadi tiga tahap penelitian. Tahap pertama yaitu kegiatan pra penelitian pada bulan April 2018, tahap kedua pada bulan Mei – Juni 2018, sedangkan Juli – Agustus 2018, yaitu kegiatan penelitian setelah usulan penelitian dilaporkan, dan tahap ketiga pada bulan September – Oktober 2018, yaitu kegiatan analisis dan verifikasi data sekaligus melengkapi data-data yang tertinggal serta membuat laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 44 Sekolah

²⁸ John W. Creswell (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

Piloting yang ditetapkan pemerintah daerah dan memiliki kelas-kelas inklusi di wilayah Kalimantan Selatan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dipilih dalam konteks penelitian sesuai dengan fokus dan kebutuhan analisis data. Penentuan sumber data bergantung pada unsur-unsur sebelumnya dan dipilih secara *purposive*. Data dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan *in-depth interview*, yaitu wawancara mendalam yang tidak terstruktur ketat. Observasi dilakukan secara terus terang dan tersamar. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yaitu dokumen mengenai profil sekolah, data peserta didik, foto-foto, dan sebagainya. Pengembangan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi disesuaikan dengan kisi-kisi indikator temuan yang telah dibangun.

E. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian ini direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Uraian dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1.	Penyusunan proposal	v							
2.	Penyusunan instrument	v							
3.	Obseravasi lapangan		v						
4.	Pelaksanaan		v	v					
5.	Analisis data				v	v			
6.	Penyusunan laporan						v	v	v

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berfokus pada kebijakan program pendidikan inklusi pada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sumber daya manusia dalam melaksanakan program pendidikan inklusi pada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah inklusi se Kalimantan Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan 13 kabupaten yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan sekitar 26 sekolah yang diamati, yaitu Kabupaten Kotabaru (SMAN 2 Kotabaru), Tanah Bumbu (SMKN 2 Simpang Empat dan SMAN 1 Kusan Hilir), Tanah Laut (SMAN 1 Jorong dan SMAN 1 Bati-Bati), Banjar (SMAN 2 Martapura, SMAN 1 Beruntung Baru, dan SMKN 1 Gambut), Barito Kuala (SMAN 1 Rantau Badauh dan SMAN 1 Tamban), Banjarbaru (SMAN 4 Banjarbaru dan SMKN 1 Banjarbaru), Kota Banjarmasin (SMAN 4 Banjarmasin, SMKN 2 Banjarmasin, dan SMA 1 PGRI Banjarmasin), Balangan (SMAN 1 Paringin dan SMAN 1 Tebing Tinggi), Tapin (SMAN 1 Binuang), Hulu Sungai Utara (SMAN 1 Danau Panggang dan SMKN 1 Amuntai), Hulu Sungai Tengah (SMAN 4 Barabai, SMAN 1 Barabai, dan SMK Ganesya Barabai), Hulu Sungai Selatan (SMAN 2 Kandungan), dan Tabalong (SMAN 1 Tanta dan SMAN 1 Tanjung).

A. Kebijakan Program Pendidikan Inklusi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang pernyandang anak cacat
2. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak
3. UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang sistem pendidikan Nasional.
4. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
5. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi.
6. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan disekolah reguler mulai dari

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada kerjasama baik pemerintah, guru maupun orang tua secara bersama-sama.²⁹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 telah menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang memelopori pendidikan inklusi. Menyikapi hal tersebut, jajaran dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di bawah arahan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dr Ngadimun MM melakukan berbagai persiapan.

Upaya Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan melakukan pendekatan sistem sebagai langkah mensukseskan program pendidikan inklusi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi, membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi (FKPI) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan, dan menentukan sekolah piloting penyelenggara pendidikan inklusi. dan sekolah inklusi. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan program beasiswa bagi guru honorer yang bekerja sama dengan Program Studi Pendidikan Luar Biasa (Prodi PLB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).

Keberadaan sekolah inklusi di Kalimantan Selatan harus digencarkan di tengah kenaikan angka anak berkebutuhan khusus (ABK) setiap tahun. Dinas Pendidik dan Kebudayaan

²⁹ Angga Saputra. 2016. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 3 September 2016. (file:///C:/Users/user/Downloads/1929-49-4128-1-10-20180705.pdf).

Kalsel mencatat ada 2 ribu lebih anak difabel yang tersebar pada 13 kota/kabupaten se-Kalsel. Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi, menuturkan angka anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kalsel terus meningkat dan perlu penanganan komprehensif. “Untuk mengatasinya, setiap sekolah reguler kami instruksikan mendirikan forum penanganan ABK di setiap kota/kabupaten,” ujar Yusuf Effendi di Banjarmasin, Minggu (17/6).

Menurut Yusuf, pendidikan inklusi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Beliau menyatakan seluruh sekolah di provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan pendidikan inklusi. Pendidik inklusi harus tersedia mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Yusuf meminta setiap kota/kabupaten di Kalsel menerima peserta didik ABK demi memperoleh hak pendidikan yang sama. Yusuf meminta pemerintah kabupaten/kota tidak lepas tanggung jawab soal sekolah inklusif. Menurut Yusuf, sekolah inklusi merupakan sekolah yang menyatukan sistem pembelajaran dalam satu lingkungan sekolah antara ABK dengan Anak Tanpa Berkebutuhan Khusus (ATBK). Melalui cara ini, peserta didik saling menghargai dan menghormati. Mata pelajaran dan kurikulum pendidikan pun sama karena ada kesetaraan. Penyandang disabilitas dibagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tuna daksa, tuna laras (anak dengan gangguan emosi, sosial dan perilaku), tuna ganda, lamban belajar, dan autis. “Tidak harus penyandang disabilitas sekolah di SLB. Tapi, mereka juga bisa sekolah dan belajar dengan anak normal lainnya di sekolah inklusi,” kata Yusuf Effendi.³⁰

³⁰ <https://kumparan.com/banjarhits/2-ribu-anak-difabel-di-kalsel-butuh-sekolah-inklusif>

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil penelitian tentang status sekolah, siswa ABK, ketersediaan sarana dan prasarana dari pemerintah disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Status Sekolah, Siswa ABK, Sarana dan Prasarana dari Pemerintah

No	Kabupaten / Kota / Sekolah	Status Sekolah	Sekolah memiliki siswa berkebutuhan khusus		Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bentuk Sarana dan Prasarana
			Data sekolah	Data disdik		
1	Kotabaru					
	SMAN 2 Kota baru	Inklusi Piloting		Ada (3 orang hiperaktif)	Lengkap	Meja belajar, tongkat, kursi, alat pendengaran, memiliki ruangan khusus

2	Tanah Bumbu					
	SMKN 2 Simpang Empat	Inklusi Piloting	Ada	Ada (1 orang tuna netra, 2 orang tuna rungu, 4 orang tuna grahita berat, 12 orang tuna laras, 1 orang autis)	Tidak lengkap	
	SMAN 1 Kusan Hilir	Inklusi		Ada (1 orang tuna daksa berat / 2 orang hiperaktif/ data disdik)		
3	Tanah Laut					
	SMA Negeri 1 Jorong	Piloting Inklusi	Ada 4 orang	Ada (1 orang tunarungu, 12 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	Kursi roda, tongkat berbagai ukuran, media pembelajaran
	SMAN 1 Bati-Bati	Inklusi	Ada (1 orang IQ rendah kelas XI)	Ada (5 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	Belum ada

4	Banjar					
	SMAN 2 Martapura	Piloting Inklusi	Ada	Ada (2 orang hiperaktif)	Lengkap	Bola dunia Braille, tongkat elektrik (tuna netra), tongkat lipat (tuna netra), tongkat bantu jalan, harmonica, puzzle (tuna grahita), sikat gigi (tuna daksa/ grahita), seruling/ recorder
	SMAN 1 Beruntung Baru	Inklusi	Ada	Ada (5 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	
	SMKN 1 Gambut	Inklusi	Ada	Ada (5 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	
5	Barito Kuala					
	SMAN 1 Rantau Badauh	Piloting Inklusi	Tidak ada	Ada (5 orang tuna grahita ringan)		
	SMAN 1 Tamban	Inklusi	Ada	Ada (5 orang tuna grahita ringan)	Lengkap	Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar

6	Banjarbaru					
	SMK Negeri 1 Banjarbaru	Piloting Inklusi	Ada	Ada (5 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	Kursi roda, tongkat, alat anak autis (sarana yang diberikan tidak sesuai dengan ketunaan)
	SMAN 4 Banjarbaru	Inklusi	Ada	Ada (2 orang tuna grahita ringan, 1 orang tuna daksa ringan, 15 orang hiperaktif)	Kurang lengkap (fasilitas pembelajaran)	Mesin braile untuk tunanetra, kursi roda untuk tunadaksa.

7	Banjarmasin					
	SMA Negeri 4 Banjarmasin	Piloting Inklusi	Ada	Ada (6 orang tuna grahita ringan, 2 orang tuna daksa ringan, 1 orang tuna daksa berat, 2 orang tuna ganda, 3 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	Tongkat, kursi roda
	SMKN 2 Banjarmasin	Inklusi	Ada	Ada (6 orang tuna grahita ringan, 2 orang tuna daksa ringan, 4 orang hiperaktif)	Lengkap	Belum ada (semuanya mandiri)
	SMA 1 PGRI Banjarmasin	Inklusi	Ada	Ada (4 orang tuna grahita ringan, 1 orang tuna daksa ringan, 2 orang autis, 3 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	Tidak ada

8	Balangan					
	SMAN 1 Paringin	Inklusi Piloting	Ada	Ada (1 orang tuna netra, 1 orang tuna rungu)	Kurang lengkap	Meja, kursi, alat pendukung lain, tongkat, globe braile
	SMAN 1 Tebing Tinggi	Inklusi	Ada	Ada (5 orang hiperaktif)	Kurang lengkap	Kursi, meja, dan beberapa alat bantu lainnya
9	Tapin					
	SMAN 1 Binuang	Inklusi	Ada	Ada (7 orang tuna laras, 1 orang hiperaktif)		
10	Hulu Sungai Utara					
	SMAN 1 Danau Panggang	Inklusi Piloting	Ada, slow-leaner	Ada (5 orang hiperaktif)	Lengkap	Kursi roda, dan alat bantu lainnya
	SMKN 1 Amuntai	Inklusi	Tidak ada	Ada (5 orang hiperaktif)		

11	Hulu Sungai Tengah					
	SMAN 4 Barabai	Inklusi Piloting	Ada	Ada (1 orang tuna daksa ringan, 8 orang hiperaktif)	Lengkap	Tongkat, kursi roda, meja, kursi, dan alat bantu lainnya
	SMAN 1 Barabai	Inklusi	Ada, orang slow-leaner		Kurang lengkap	Tidak ada
12	Hulu Sungai Selatan					
	SMAN 2 Kandungan	Inklusi Piloting	Ada (4 orang: 1 orang kelas X, 2 orang kelas XI, 1 orang kelas XII) slow leaner	Ada (5 orang hiperaktif)	Lengkap	Kursi roda, alat bantu lainnya
13	Tabalong					
	SMAN 1 Tanta	Inklusi	Ada		Kurang lengkap	Tongkat, globe brainler, mebeler, buku
	SMAN 1 Tanjung	Inklusi	Ada		Lengkap	Mebelir dan buku

Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua siswa. Kebijakan program pendidikan inklusi oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan tersebut terus dilaksanakan. Salah satu upaya pemerintah provinsi memberikan bantuan melalui dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Selatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pada sekolah inklusi piloting atau sekolah inklusi. Pendidikan inklusif mengakomodasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya tanpa mengacuhkan kelainan yang dialaminya³¹, dimana pendidikan inklusif memfasilitasi kelainan anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti pendidikan seperti anak pada umumnya.

Program pendidikan inklusi ini didasari dari kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk dilaksanakan di setiap jenjang sekolah se Kalimantan Selatan. Tentu saja perlu waktu untuk menyesuaikan dan menerapkan program tersebut. Dari data penelitian yang diperoleh, sekolah yang memiliki jumlah siswa ABK yang lebih banyak adalah sekolah yang mengantongi SK sebagai sekolah inklusi piloting. Berdasarkan wawancara dan survey ke sekolah tersebut terlihat dari data yang diperoleh secara sarana dan prasarana sudah lengkap. Namun di sekolah inklusi masih ada beberapa sarana dan prasarana yang belum ada, ini pun secara korelasi terlihat dari jumlah siswa ABK yang masih sedikit.

Ada beberapa sekolah inklusi oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang masih tidak ingin dikatakan sebagai sekolah inklusi. Mereka beranggapan sekolah belum siap,

31 Latifa Garnisti Rifani (2016), "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta", Skripsi, UNY, Yogyakarta.

dikarenakan berbagai kendala yang pasti akan dihadapi. Perbedaan karakter siswa ABK yang tergolong berat dengan siswa reguler tentu akan mengalami permasalahan dalam sosial mereka, kecuali siswa ABK yang masih tergolong ringan masih bisa menyesuaikan pembelajaran di sekolah umum yang berlabel inklusi. Sehingga jika ada siswa ABK yang tergolong berat maka pihak sekolah pada saat mendaftar di sekolah ataupun pada saat sudah sekolah di sekolah tersebut jika mengalami kendala yang banyak, maka sekolah akan menyarankan untuk menempuh pendidikan di sekolah khusus atau SLB. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan pengertian kepada orang tua agar siswa tersebut memiliki penanganan yang lebih intensif dan bisa berkembang dengan baik.

Namun disisi fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa sarana dan prasarana yang diperoleh seperti bola dunia Braille, tongkat elektrik (tuna netra), tongkat lipat (tuna netra), tongkat bantu jalan, harmonica, puzzle (tuna grahita), sikat gigi (tuna daksa/grahita), seruling/recorder, kereta dorong, meja dan kursi khusus, ruangan khusus, dan yang lainnya masih dianggap sekolah adalah diperuntukkan bagi siswa ABK yang tergolong berat. Hal ini tentu saja masih dalam penyesuaian antara pihak sekolah dengan keinginan pihak pemerintah yang bagaimana yang mereka inginkan. Pemerintah menginginkan semua sekolah siap menerima siswa ABK baik tergolong ringan ataupun berat dengan menfasilitasi semua alat bantu tersebut untuk membantu kesiapan sekolah untuk mensukseskan program pendidikan inklusi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa sebagian sekolah sudah cukup baik dalam menjalankan program inklusi kebijakan pemerintah tersebut

terutama sekolah piloting inklusi ataupun sekolah inklusi yang sudah memiliki siswa ABK dan telah didukung sarana dan prasarana yang sudah diperbantukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Namun, saat ini siswa ABK yang ada di sekolah tersebut masih belum menggunakan alat-alat bantu tersebut karena masih tergolong siswa ABK yang ringan. Sekolah inklusi masih perlu terus ditingkatkan dari seluruh aspek guna mendukung terlaksanaknya program pendidikan di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan optimal. Berdasarkan temuan Haryono, dkk (2015) mengungkapkan bahwa melalui penilaian sistem akreditasi pendidikan inklusif, bahwa manajemen komponen pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Tengah umumnya dinilai kategori C (skor total = 24-43) dan tidak terakreditasi (skor total = <24). Sementara itu, akreditasi sekolah SLB di Jawa Tengah umumnya diberi peringkat kategori B (total skor 44-63).³²

Secara konseptual model pendidikan inklusi menjanjikan sejumlah keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, hal ini dimungkinkan karena anak dapat memperoleh pendidikan pada sekolah manapun yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Di sisi lain, model pelayanan pendidikan seperti ini juga dianggap lebih efisien karena tidak perlu mendirikan sekolah khusus bagi mereka. Pendidikan Inklusi juga memungkinkan anak untuk belajar sosial dan emosi secara lebih wajar. Di sisi lain model ini juga akan mendorong

32 Haryono, dkk. (2015). *Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 32 Nomor 2 Tahun 2015.

siswa lain yang normal untuk belajar menghargai dan menerima anak-anak dengan kekurangan tersebut³³.

B. Sumber Daya Manusia dalam Melaksanakan Program Pendidikan Inklusi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, tentu saja pendidikan yang mampu mengintegrasikan keseimbangan nilai-nilai pendidikan itu sendiri sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara antara daya cipta, daya rasa dan daya karsa. Sebab hanya melalui pendidikan manusia akan terlepas dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan (Dedy Muyasana, 2011).

Pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan RI adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Betapa pentingnya persoalan mencerdaskan bangsa bagi suatu negara, sehingga para pendiri negara (*founding fathers*) sejak awal berdirinya negara telah dipikirkan jauh ke depan terhadap pentingnya bangsa yang cerdas, berkualitas, bangsa yang berkarakter. Untuk itu telah diamanatkan UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas pada pasal 34 ayat 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Demikian juga pasal 49 UU nomor 20 tahun 2003 bahwa dana pendidikan selain gaji dialokasikan 20% dari APBN dan APBD. Kewajiban pemenuhan dana 20% dari APBD ini telah dipenuhi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2010, sehingga harapannya target capaian tujuan pendidikan berkualitas untuk mempersiapkan

³³ Smith J. David (2006), *Inklusi Sekolah ramah Untuk Semua*, (terj.) Sugiarmun. Bandung: Nuansa.

guru-guru yang memiliki kompetensi khusus terhadap pendidikan siswa berkebutuhan khusus seperti pada pendidikan inklusi dapat terwujud.

Sudah barang tentu penyelenggaraannya diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih efektif antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang lebih proaktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Penyelenggaraan kebijakan pendidikan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien serta mengikutsertakan masyarakat sedapat-dapatnya dalam mengambil keputusan, merencanakan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas pembangunan daerahnya (H. A. R. Tilaar, 2008).

Penyelenggaraan pendidikan seperti pendidikan inklusif bertujuan mengembangkan individu peserta didik secara alami atau wajar, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi-potensi mereka seperti apa adanya. Tidak perlu diarahkan ke arah tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu pendidik hanya memberi bantuan atau layanan dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan serta bimbingan secukupnya. Program Studi PLB FKIP UNLAM menyelenggarakan Pendidikan Sarjana (S1) yang bekerja sama dengan Pemda Kalsel. Sehingga upaya untuk menyiapkan tenaga guru pendidikan inklusi yang berkompetensi dapat terwujud.

Untuk memperoleh ilmu melalui pendidikan, setiap manusia mempunyai aneka ragam kecerdasan yang sangat berbeda, tentu dengan kemampuan belajar yang berbeda pula, ada pembelajar cepat (*fast learner*), pembelajar normal (*normally learner*), ada pula pembelajar lambat (*slow learner*)

dan ada juga yang mengalami hambatan belajar karena alasan khusus seperti Disleksia, ADHD (Attention Deficit Hyperaktif Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder), dan autisme³⁴.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang memproses atau mencetak tenaga guru yang dipersiapkan untuk mendidik anak bangsa yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil penelitian tentang Guru Pendamping Khusus (GPK), kemampuan guru mata pelajaran terhadap pelayanan siswa ABK, program pelatihan guru, bentuk program pelatihan dan pelatihan bagi guru PAI disajikan pada Tabel 3 berikut.

34 Munif Chatib, Sekolah Anak-anak Juara, (Bandung; Kaifa, 2012) hal. 29

Tabel 3. Guru Pendamping Khusus (GPK), Kemampuan Guru Mata Pelajaran terhadap Pelayanan Siswa ABK, Program Pelatihan Guru, Bentuk Program Pelatihan dan Pelatihan bagi Guru PAI

No	Kabupaten / Kota / Sekolah	Guru Pendamping Khusus (GPK)	Pelayanan Guru terhadap siswa ABK	Program pelatihan guru	Bentuk program pelatihan	Pelatihan guru PAI
1	Kotabaru					
	SMAN 2 Kotabaru		Mampu	Ada		Tidak diikuti
2	Tanah Bumbu					
	SMKN 2 Simpang Empat	Tidak ada	Mampu	Ada		Tidak diikuti
	SMAN 1 Kusan Hilir	Tidak ada	Mampu	Ada	Pelatihan dari pemda tentang pendidikan inklusi selama 2 tahun	Diikuti
3	Tanah Laut					
	SMA Negeri 1 Jorong	Tidak ada	Kurang mampu	Ada	Assesment anak berkebutuhan khusus di Jakarta (tuna rungu)	Tidak diikuti
	SMAN 1 Bati-Bati	Tidak ada	Kurang mampu	Ada (guru BK)	Sosialisasi sekolah inklusi	Tidak diikuti

4	Banjar					
	SMAN 2 Martapura	Ada	Mampu	Ada	Workshop, bimbingan teknis, studi banding	Diikut-kan
	SMAN 1 Beruntung Baru	Tidak ada	Mampu	Tidak ada		Tidak diikutkan
	SMKN 1 Gambut	Tidak ada	Mampu	Tidak ada		Tidak diikutkan
5	Barito Kuala					
	SMAN 1 Rantau Badauh					
	SMAN 1 Tamban	Tidak ada	Mampu	Ada	Workshop dan pelatihan	Tidak diikutkan
6	Banjarbaru					
	SMK Negeri 1 Banjarbaru	Tidak ada	Mampu	Tidak ada		
	SMAN 4 Banjarbaru	Ada	Mampu	Ada	Manaje-men stress, manajemen inklusi dan cara menga-tasinya	Diikut-kan

7	Banjarmasin					
	SMA Negeri 4 Banjarmasin	Tidak ada	Mampu	Ada	Pelatihan yang berhubungan dengan visi misi sekolah, anggaran sekolah yang harus memuat inklusi didalamnya	Tidak diikuti
	SMKN 2 Banjarmasin	Tidak ada (hanya guru BK yang dianggap sebagai GPK)	Sangat mampu	Tidak ada		Tidak diikuti
	SMA 1 PGRI Banjarmasin	Tidak ada	Mampu	Ada	In House Training dari dosen ULM	Tidak diikuti
8	Balangan					
	SMAN 1 Paringin	Tidak ada	Kurang mampu	Ada (dari provinsi)	Masalah pembelajaran dan metodologi, teknis pembelajaran siswa	Tidak diikuti
	SMAN 1 Tebing Tinggi	Tidak ada	Kurang mampu	Tidak ada		Tidak diikuti
9	Tapin					
	SMAN 1 Binuang					

10	Hulu Sungai Utara					
	SMAN 1 Danau Panggang	Tidak ada	Mampu	Ada (guru BK dan kesis-waan)	Identifikasi siswa ABK	Tidak diikuti
	SMKN 1 Amuntai			Ada (guru PKn)	Identifikasi siswa ABK, kurikulum modifikasi	Tidak diikuti
11	Hulu Sungai Tengah					
	SMAN 4 Barabai	Ada	Mampu	Ada (guru sejarah, bahasa inggris, wakasek kurikulum) dari provinsi. Dan semua guru di sekolah	Identifikasi ABK, Penanganan siswa ABK di provinsi. Sosialisasi pendidikan inklusi (IHT) di sekolah	Diikuti
	SMAN 1 Barabai					
12	Hulu Sungai Selatan					
	SMAN 2 Kandangan	Ada	Kurang mampu	Ada	Pelatihan tentang siswa ABK	Tidak diikuti

13	Tabalong					
	SMAN 1 Tanta	Tidak Ada	Mampu	Tidak ada	Tidak ada pelatihan khusus, siswa inklusinya sudah lulus tahun 2016/2017	Tidak diikuti
	SMAN 1 Tanjung	Ada	Mampu	Ada	Pelatihan dari provinsi	Tidak diikuti

Hasil kerjasama ULM prodi S1 PLB dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, memiliki lulusan program S1 PLB yang sebagian statusnya sebagai guru honorer di sekolah inklusi piloting. Hal ini tentu sangat membantu program pendidikan inklusi di sekolah tersebut, dengan menjadikan para alumni sebagai Guru Pendamping Khusus (GPK). Namun tidak semua sekolah inklusi piloting ataupun sekolah inklusi memberdayakan mereka sebagai GPK, dikarenakan berbagai hal. Salah satunya karena pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi tidak memberikan wewenang kepada pihak sekolah untuk GPK tersebut, selain itu tentu terkait dengan honor yang akan dibebankan kepada pihak sekolah, sehingga sekolah enggan menugaskan sebagai GPK.

Penanganan siswa ABK sangat penting diperhatikan agar lebih dioptimalkan lagi, seperti ketersediaan GPK di sekolah inklusi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sunanto (2009) menunjukkan bahwa (1) jumlah ABK di Sekolah Dasar inklusif bervariasi dari 1 sampai 4 anak. Sedangkan jumlah siswa antara 20 dan 46. Pada umumnya kelas yang memiliki siswa ABK gurunya lebih dari satu. (2) rata-rata indeks inklusi sebesar 38,58 dengan indeks ideal 54. (3) indeks inklusi yang tinggi

dicapai di kelas yang memiliki guru lebih dari satu, gurunya sering mengikuti pelatihan penanganan ABK, siswa ABK lebih banyak, dan jumlah siswa keseluruhan lebih sedikit³⁵.

Anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan, oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa sekolah piloting inklusi maupun sekolah inklusi sebagian guru sudah mampu melayani dan mengatasi permasalahan siswa ABK tersebut. Hal ini tentu saja didukung oleh peran semua pihak terkait di sekolah tersebut, seperti adanya kerjasama dengan guru mata pelajaran PAI dan guru pelajaran yang lainnya, wali kelas, wakasek kesiswaaan, dan guru BK. Siswa ABK yang ada di sekolah tersebut masih tergolong ringan sehingga masih bisa di atasi oleh pihak sekolah. Namun hal ini tentu saja masih perlu menyediakan GPK dalam penanganan dan pelayanan kepada siswa ABK harus lebih secara intensif.

Peran tenaga pendidik kelas inklusi (guru mata pelajara, wali kelas, Guru Pendidik Khusus (GPK), guru bantu) sangat penting di kelas Inklusi. Yang perlu diperhatikan adalah dalam manajemen pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antara guru pembimbing dengan guru regular. Guru regular bertanggung jawab dalam pembelajaran bagi semua siswa, sedangkan guru pembimbing khusus bertanggung jawab memberikan layanan pembelajaran bagi ABK di kelas inklusi. Bagi GPK dengan latar belakang sarjana pendidikan

35 Juang Sunanto (2009). *Indeks Insklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang terdapat ABK di Sekolah Dasar*. Jurnal JASSI; Anakku, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2009.

luar biasa, berperan sebagai pendamping, dan bekerja sama dengan guru mata pelajaran PAI, dan wali kelas dalam memberikan asesmen, menyusun program pengajaran individual. Selain itu, GPK memberikan layanan kekhususan dan layanan pendidikan bagi ABK yang mengalami hambatan dalam pembelajaran akademik. Guru mata pelajaran PAI juga harus telah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang layanan pendidikan bagi ABK.³⁶

Secara umum rintangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat kelainan tertentu, dan anak-anak yang berkelainan yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Setiap anak yang memiliki hambatan temporer maupun permanen memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor lingkungan, (2) faktor dalam diri anak sendiri, dan (3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Sesuai kebutuhan lapangan maka pada penelitian ini hanya dibahas secara singkat pada kelompok anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer.

Upaya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas pendidikan dan kebudayaan memfasilitasi kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru PAI dan guru yang lainnya melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek, dan workshop yang terkait dengan pendidikan inklusi. Ada beberapa guru ikut pelatihan tingkat nasional tentang pendidikan inklusi yang diselenggarakan kementerian pendidikan dan kebudayaan di Jakarta. Tujuan dari

³⁶ Ismail. (2011). Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. Semarang. Media Group.

kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut adalah untuk mempersiapkan dalam pemahaman dan penanganan terhadap siswa ABK.

Perlunya peningkatan pengetahuan bagi guru PAI untuk memahami siswa ABK. Berdasarkan data hasil penelitian sebagian guru PAI telah mengikuti pelatihan tentang penanganan siswa ABK. Hal ini bertujuan agar guru PAI mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas inklusi. Anak dengan gangguan belajar spesifik yaitu anak yang mengalami gangguan dalam memproses pembelajaran secara spesifik seperti sulit membaca, menulis dan berhitung. Menurut Yuyus anak berkesulitan belajar adalah gangguan neorologis yang dapat dialami oleh orang dewasa dan anak-anak bukan dari kecacatan, kesulitan ini bersifat biologis yang terutama diakibatkan oleh lambannya kematangan atau tidak efektifnya fungsi bagian otak tertentu dan mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.³⁷ Sehingga melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimtek bagi guru PAI diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan siswa ABK.

C. Implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah inklusi se Kalimantan Selatan

Berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti menggali informasi untuk mendeskripsikan implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah (studi kasus pada kelas inklusi se Kalimantan Selatan) terutama di Sekolah Inklusi Piloting atau pun di Sekolah Inklusi yang memiliki kelas-kelas inklusi. Implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di sekolah inklusi se Kalimantan Selatan untuk mendeskripsikan

³⁷ Yuyus, *Adaptasi Pembelajaran Siswa Berkesulitan Belajar* (Bandung: Rizqi, 2005), 5.

instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi, mendeskripsikan proses implementasi instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi, dan mendeskripsikan keunikan pembelajaran di kelas-kelas inklusi yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Instrumen Evaluasi Pembelajaran PAI di Kelas-kelas Inklusi

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil penelitian tentang Kurikulum yang digunakan, bentuk penilaian khusus guru PAI dan raport khusus ABK disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kurikulum yang Digunakan, Bentuk Penilaian Khusus Guru PAI dan Raport Khusus ABK

No	Kabupaten / Kota / Sekolah	Kurikulum yang digunakan	Bentuk Penilaian Khusus Guru PAI	Raport Khusus ABK
1	Kotabaru			
	SMAN 2 Kotabaru	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
2	Tanah Bumbu			
	SMKN 2 Simpang Empat	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
	SMAN 1 Kusan Hilir	Kurikulum modifikasi	Tidak menggunakan	Ada
3	Tanah Laut			
	SMA Negeri 1 Jorong	Kurikulum umum	Menggunakan	Tidak ada
	SMAN 1 Bati-Bati	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada

4	Banjar			
	SMAN 2 Martapura	Kurikulum umum dan modifikasi	Menggunakan	Tidak ada
	SMAN 1 Beruntung Baru	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
	SMKN 1 Gambut	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
5	Barito Kuala			
	SMAN 1 Rantau Badauh	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
	SMAN 1 Tamban	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
6	Banjarbaru			
	SMK Negeri 1 Banjarbaru	Kurikulum modifikasi	Menggunakan	Tidak ada (ada laporan khusus dari tim inklusi)
	SMAN 4 Banjarbaru	Kurikulum individual (sebaiknya anak tingkat ketunaannya parah dimasukkan di SLB saja, agar hak-hak mereka terpenuhi	Tidak menggunakan	Tidak ada

7	Banjarmasin			
	SMA Negeri 4 Banjarmasin	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
	SMKN 2 Banjarmasin	Kurikulum umum	Menggunakan	Tidak ada (hanya saja diminimalkan)
	SMA 1 PGRI Banjarmasin	Kurikulum modifikasi	Menggunakan	Tidak ada (hanya ada keterangan tersendiri untuk anak inklusi/ rencana kedepan ada raport khusus)
8	Balangan			
	SMAN 1 Paringin	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
	SMAN 1 Tebing Tinggi	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
9	Tapin			
	SMAN 1 Binuang	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
10	Hulu Sungai Utara			
	SMAN 1 Danau Panggang	Kurikulum umum (karena permasalahan siswa ABK masih ringan)	Menggunakan (KKM sudah dibedakan)	Tidak ada (mencapai KKM berbeda dengan siswa reguler)
	SMKN 1 Amuntai	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada

11	Hulu Sungai Tengah			
	SMAN 4 Barabai	Kurikulum umum, beberapa kasus dilakukan penanganan secara individual	Tidak menggunakan	Tidak ada
	SMAN 1 Barabai	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
12	Hulu Sungai Selatan			
	SMAN 2 Kandangan	Kurikulum modifikasi dan individual	Tidak menggunakan	Tidak ada
13	Tabalong			
	SMAN 1 Tanta	Kurikulum umum	Tidak menggunakan	Tidak ada
	SMAN 1 Tanjung	Kurikulum umum (sistem SKS), kurikulum modifikasi (siswa baru dites psikologi untuk siswa ABK	Tidak menggunakan	Tidak ada

Instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi secara umum masih belum ada dibuat oleh guru PAI. Hal ini tentu terkait dengan kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum umum. Sehingga para guru PAI masih menggunakan perangkat RPP dan penilaian dengan menggunakan kurikulum umum tanpa dimodifikasi. Guru PAI menggunakan instrumen evaluasi yang umum,

artinya instrumen evaluasi sama digunakan untuk siswa regular ataupun siswa ABK. Perlu dilakukan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran PAI modifikasi melalui kegiatan pelatihan/workshop.

Evaluasi pembelajaran termuat didalamnya berupa program perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi. Prinsip penilaian siswa ABK yaitu: (1) bagi siswa ABK ringan yang mengikuti kurikulum umum dengan menggunakan kriteria penilaian regular sepenuhnya, (2) bagi siswa ABK sedang menggunakan kurikulum modifikasi dengan perpaduan antara penilaian umum dan penilaian individual, (3) bagi siswa ABK berat menggunakan penilaian individual yang disesuaikan dengan tingkat daya serap siswa tersebut, dan (4) laporan penilaian bagi siswa ABK harus dilengkapi dengan deskripsi naratisnya, agar menghindari kekaburan dan mempertegas jenis dan kualitas kompetensi yang lebih dikuasai siswa.

Secara umum sekolah inklusi di Kalimantan Selatan masih menggunakan kurikulum umum, namun ada beberapa sekolah menggunakan kurikulum modifikasi, dan ada beberapa kasus dilakukan penangan secara individual seperti ditemukan di SMKN 1 Banjarbaru, SMAN 1 Danau Panggang, dan SMAN 4 Barabai. Hal ini sejalan dengan penelitian Maftuhatin (2014) melaporkan bahwa evaluasi pembelajaran sudah cukup bagus karena guru sudah menerapkan dua metode dalam evaluasi yaitu dengan soal yang disamakan dengan regular dan yang kedua dengan soal sesuai dengan kebutuhan mereka, disertai dengan portofolio yang mencatat perkembangan mereka selama pembelajaran.³⁸

38 Maftuhatin, Lilik. 2014. *Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di S Plus arul Ulum Jombang*. Religi: Jurnal Studi Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2014; ISSN: 1978-306X; 201-227

Beberapa sekolah sebagian sudah melakukan penanganan secara individual. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan keistimewaan yang harus dimodifikasi. Dengan kata lain, siswa ABK di kelas inklusi belajar bersama dengan siswa regular dalam berbagai kegiatan proses belajar berlangsung. Hal ini tentu tidak lepas dari bimbingan guru mata pelajaran. Sedangkan guru pendamping khusus apabila jika beberapa kondisi tertentu yang tidak dapat diikuti oleh siswa ABK tersebut maka perlu melakukan penanganan individual.

Selain itu, berdasarkan temuan secara umum belum tersedianya raport khusus siswa ABK. Penggunaan raport masih secara umum, namun ada beberapa kasus untuk siswa ABK di raportnya sesuai dengan KKM. Laporan tertulis tentang hasil evaluasi dan penilaian PAI di kelas inklusi dituangkan dalam raport siswa secara umum seperti halnya siswa regular. Namun perlu ditambahkan raport narasi yang telah disesuaikan bagi siswa ABK.

Kelulusan siswa ABK di kelas inklusi dibagi menjadi tiga yaitu jalur regular (siswa mengikuti tes sama dengan siswa regular lainnya sesuai dengan standar pendidikan nasional yang berlaku, tanpa melalui adaptasi cara tanpa adaptasi isi), jalur regular modifikasi (siswa mengikuti tes yang sama dengan yang lainnya dengan melakukan beberapa modifikasi terhadap soal yang diberikan), dan jalur individual (siswa mengikuti tes tersendiri dengan program dan materi yang telah dipelajari).

Berdasarkan temuan ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan kurikulum modifikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohmah (2010) membuktikan bahwa model pembelajaran PAI untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah model pembelajaran berbasis kompetensi anak dengan mengembangkan lingkungan belajar secara terpadu antara prinsip-prinsip umum dan khusus dalam pembelajarannya³⁹. Kurikulum pendidikan inklusi

39 Rohmah Siti Mamah (2010). *PAI dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Tesis.

menggunakan kurikulum sekolah regular yang dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi dapat diartikan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi/materi.⁴⁰

Penyelenggaraan sekolah inklusi perlunya penyesuaian kurikulum, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan belajar dengan kemampuan siswa ABK. Hal ini bertujuan agar siswa ABK mampu menguasai materi pelajaran dengan baik. Tentu akan mengalami perbedaan waktu dalam penguasaan materi pelajaran antara siswa ABK dan siswa regular. Dengan kata lain, kecepatan dalam penguasaan materi pelajaran tentu tidaklah harus sama, dan tentu perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa secara individual. Sehingga kurikulum yang fleksibel akan memberikan kesempatan kepada siswa ABK untuk belajar bersama dengan siswa regular di sekolah inklusi.

Menurut Dr. Sutji Harijanto bahwa model kurikulum sekolah inklusi adalah; (1) duplikasi kurikulum berdasarkan tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata/regular seperti siswa tunanetra, tunarungu, wicara, tunadaksa, dan tunalaras dengan tetap memodifikasi proses pembelajaran yang sesuai, (2) modifikasi kurikulum dengan menyesuaikan kurikulum siswa rata-rata/regular dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi ABK, seperti tunagrahita, gifted and talented (eskalasi), (3) substitusi kurikulum dengan memperhatikan beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara dengan melihat situasi dan kondisi siswa ABK, (4) omisi kurikulum yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.

40 Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB). (2010). Pedoman Manajemen dan Pembelajaran Sekolah Inklusi. Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional.

tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak-anak reguler.⁴¹

Sekolah inklusi yang telah menggunakan kurikulum modifikasi dengan bertujuan pembelajaran lebih fleksibel, dan menyesuaikan kemampuan siswa tentu tidak terlepas dari peran semua pihak antara guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, orang tua, para profesional dan siswa. Kurikulum meliputi program kerja, perumusan tujuan, isi, strategi, metode pembelajaran, organisasi kelas, asesmen, evaluasi, komunikasi dan pembiayaan. Kurikulum tersebut akan berdampak positif untuk memberikan pelayanan yang baik dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa pada saat proses belajar berlangsung.

Penilaian hasil belajar siswa inklusi harus disesuaikan dengan kemampuan siswa melalui hasil observasi kemampuan mereka sebelumnya dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Penilaian tersebut dilaksanakan pada saat awal, tengah, dan akhir proses kegiatan belajar berlangsung yang idealnya instrumen penilaian harus disesuaikan dengan kondisi, kompetensi, dan program belajar bagi siswa inklusi. Penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan bisa dilakukan melalui observasi, protopolio, bentuk ceklist (keterampilan, pengetahuan, dan perilaku), tes (tertulis dan lisan), kuis, serta penilaian diri sendiri serta jurnal reflektif.

2. Proses Implementasi Instrumen Evaluasi Pembelajaran PAI di Kelas-kelas Inklusi

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil penelitian tentang perbedaan proses dan instrumen evaluasi hasil

⁴¹ Aidan Rohail. Kurikulum dan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). www.kurikulum-dan-pendidikan-inklusi-bagi.html. Diakses tanggal 7 Juni 2021.

pembelajaran, bentuk evaluasi guru PAI, evaluasi bentuk praktik disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perbedaan Proses dan Instrumen Evaluasi Hasil Pembelajaran, Bentuk Evaluasi Guru PAI, Evaluasi Bentuk Praktik

No	Kabupaten / Kota / Sekolah	Perbedaan proses dan instrumen evaluasi hasil pembelajaran	Bentuk evaluasi guru PAI	Evaluasi bentuk praktik
1	Kotabaru			
	SMAN 2 Kotabaru	Tidak ada perbedaan	Pilihan ganda, essay, praktik	Praktik sholat, wudhu, baca tulis Al-Qur'an
2	Tanah Bumbu			
	SMKN 2 Simpang Empat	Tidak ada perbedaan	Pilihan ganda, essay, praktik	Praktik sholat, wudhu, baca tulis Al-Qur'an
	SMAN 1 Kusan Hilir	Tidak ada perbedaan	Lisan, pilihan ganda, essay, isian, benar-salah, praktik	Praktik sholat, wudhu, baca tulis Al-Qur'an
3	Tanah Laut			
	SMA Negeri 1 Jorong	Ada perbedaan	Pilihan ganda, essay, praktik	Praktik sholat, wudhu, baca tulis Al-Qur'an
	SMAN 1 Bati-Bati	Tidak ada perbedaan		

4	Banjar			
	SMAN 2 Martapura	Ada perbedaan		
	SMAN 1 Beruntung Baru	Tidak ada perbedaan		
	SMKN 1 Gambut	Tidak ada perbedaan		
5	Barito Kuala			
	SMAN 1 Rantau Badauh	Tidak ada perbedaan		
	SMAN 1 Tamban	Tidak ada perbedaan	Pilihan ganda, essay, praktik	Sama seperti siswa yang lain
6	Banjarbaru			
	SMK Negeri 1 Banjarbaru	Ada perbedaan	Bentuk evaluasi sesuai dengan ketunaan dan jurusan	Menghapal sesuai kemampuan, praktik shalat, mengaji
	SMAN 4 Banjarbaru	Ada perbedaan (ada standar khusus)	Lisan (untuk yang ketunaannya bukan fisik), praktik	Mengaji, praktik sholat, adzan

7	Banjarmasin			
	SMA Negeri 4 Banjarmasin	Tidak ada perbedaan	Lisan, pilihan ganda, bervariasi menyesuaikan dengan guru dan mapel	Sholat, adzan, iqamah
	SMKN 2 Banjarmasin	Ada perbedaan	Lisan, pilihan ganda, praktik	Praktik sholat, wudhu, baca tulis Al-Qur'an
	SMA 1 PGRI Banjarmasin	Ada perbedaan	Lisan, praktik	Praktik sholat, membaca Al-Qur'an juz amma
8	Balangan			
	SMAN 1 Paringin	Ada perbedaan (tingkat kesukaran soal lebih mudah)	Pilihan ganda, dan essay	Praktik sholat, wudhu, baca tulis Al-Qur'an
	SMAN 1 Tebing Tinggi	Tidak ada perbedaan	Pilihan ganda dan essay	Tidak ada
9	Tapin			
	SMAN 1 Binuang	Tidak ada perbedaan	Lisan, pilihan ganda, essay, isian, benar-salah, praktik (soal remedial disesuaikan)	Praktik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai (tidak ada permasalahan yang terlihat karena siswa ABK kategori ringan)

10	Hulu Sungai Utara			
	SMAN 1 Danau Panggang	Tidak ada perbedaan	Lisan, pilihan ganda, essay, isian, benar-salah, praktik (soal remedial disesuaikan)	Praktik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai (tidak ada permasalahan yang terlihat karena siswa ABK kategori ringan)
	SMKN 1 Amuntai	Tidak ada perbedaan	Bervariasi	Praktik sama dengan siswa regular
11	Hulu Sungai Tengah			
	SMAN 4 Barabai	Tidak ada perbedaan (hanya saja untuk siswa ABK perlu beberapa kali remedial)	Bervariasi, lisan, pilihan ganda, essay, isian, benar-salah, praktik	Semua kegiatan praktik sesuai KD dicapai, namun perlu penanganan lebih khusus untuk siswa ABK
	SMAN 1 Barabai	Tidak ada perbedaan	Lisan, pilihan ganda, essay	Praktik sholat, wudhu, baca tulis Al-Qur'an

12	Hulu Sungai Selatan			
	SMAN 2 Kandungan	Tidak ada perbedaan	Bervariasi, disesuaikan	Sama dengan siswa regular, namun ada beberapa penanganan lebih khusus
13	Tabalong			
	SMAN 1 Tanta	Tidak ada perbedaan	Essay, pilihan ganda	Praktik belum dilaksanakan
	SMAN 1 Tanjung	Ada perbedaan (satu kelas khusus seperti UKB = Unit Kegiatan Belajar Mandiri	Pilihan ganda, essay	1 kelas khusus lulus tahun 2018, dengan UKB. Pratik tentu penanganan dikelas khusus

Berdasarkan temuan, secara umum pelaksanaan proses implementasi evaluasi pembelajaran PAI di kelas inklusi masih menggunakan penilaian umum. Artinya penilaian yang dilakukan oleh guru PAI masih menggunakan penilaian yang umum baik pada siswa regular maupun siswa ABK. Hanya saja dalam beberapa kasus ada guru PAI yang melakukan remedial beberapa kali bagi siswa ABK yang lambat belajar untuk mencapai KKM yang sama, ada juga guru PAI di sekolah inklusi telah memiliki satu kelas khusus sehingga penanganannya sudah khusus pula. Hal ini sejalan penelitian Maftuhatin (2014) bahwa evaluasi pembelajaran sudah cukup bagus karena guru sudah menerapkan dua metode dalam evaluasi yaitu dengan soal yang disamakan dengan reguler dan yang kedua dengan soal sesuai dengan

kebutuhan mereka, disertai dengan portofolio yang mencatat perkembangan mereka selama pembelajaran⁴².

Secara umum hasil penelitian terkait tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI di kelas inklusi belum optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaporkan oleh Romadhona, Reni (2018) pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam belum dilakukan dengan optimal oleh Guru Pendidikan Agama Islam di SDLB Insan Prima Bestari (IPB) Sukarame Kota Bandar Lampung, hal ini terlihat masih banyaknya kekurangan baik dalam perencanaan atau pelaksanaannya dalam melakukan evaluasi⁴³. Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.⁴⁴ Jika kegiatan evaluasi pembelajaran tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diukur sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, selain itu tidak dapat diidentifikasi kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran tersebut.

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran dalam lembaga pendidikan, tidak hanya bersifat teoritis semata, tetapi juga membekali peserta didik dengan pengalaman praktis, karena syariat Islam pada dasarnya bersifat amaliyah, upaya ini ditempuh untuk membiasakan peserta didik agar selalu menjalankan atau mengamalkannya

42 Lilik Maftuhatin, Prodi. Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang RELIGI, Vol. V, No. 1 Volume 6, Nomor 2, Oktober 2014.

43 Ramadhona, Reni. 2018. *Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Insan Prima Bestari (IPB) Sukarame Bandar Lampung*. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.

44 Indah Komsiyah, *Belajar Dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm:

sebagai way of life. Seperti mata pelajaran pada umumnya, Pendidikan Agama Islam mengembangkan tiga aspek dalam pembelajarannya yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor.⁴⁵ Oleh karena itu evaluasi pembelajaran PAI menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan, dengan bertujuan memperoleh informasi berupa data untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan siswa setelah proses belajar berlangsung. Hal ini tentu saja menjadi suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan pada kelas inklusi, yang tentunya pelaksanaannya pun berbeda antara siswa regular dan siswa ABK.

Anak dengan gangguan belajar spesifik yaitu anak yang mengalami gangguan dalam memproses pembelajaran secara spesifik seperti sulit membaca, menulis dan berhitung. Menurut Yuyus anak berkesulitan belajar adalah gangguan neorologis yang dapat dialami oleh orang dewasa dan anak-anak bukan dari kecacatan, kesulitan ini bersifat biologis yang terutama diakibatkan oleh lambannya kematangan atau tidak efektifnya fungsi bagian otak tertentu dan mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.⁴⁶

Anak-anak yang mengalami gangguan belajar, lamban belajar (*slow learner*) mereka ini adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah anak pada umumnya, sedangkan anak tunagrahita memiliki IQ berkisar 80-85. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), anak lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah anak pada umumnya.⁴⁷

45 Lilik Maftuhatin, Prodi. Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang RELIGI, Vol. V, No. 1 Volume 6, Nomor 2, Oktober 2014.

46 Yuyus, *Adaptasi Pembelajaran Siswa Berkesulitan Belajar* (Bandung: Rizqi, 2005), 5.

47 Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 13.

Sedangkan menurut Bandi, anak lamban belajar adalah anak yang berprestasi rendah karena mereka memiliki IQ sedikit rendah dibanding dengan anak pada umumnya sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.⁴⁸

Evaluasi pembelajaran PAI kelas inklusi harus disesuaikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Kemampuan siswa yang dikelompokkan ke dalam kelompok regular, regular modifikasi dan individual. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI kelas inklusi melalui tes tertulis, tes lisan, tes praktek, dan sikap. Tes tertulis/tes lisan, tes praktek dapat dilaksanakan pada setiap kompetensi dasar mata pelajaran PAI. Selain itu juga pada UTS, UAS dan UN yang disesuaikan dengan kondisi siswa ABK di sekolah inklusi.⁴⁹

Siswa ABK kelompok regular penilaian dilaksanakan melalui tes tertulis disamakan dengan siswa lainnya dikelas, dengan penambahan waktu 20 menit dari batas yang tertera dalam lembar soal. Selain itu, pada kondisi khusus siswa ABK diberi soal dengan *font* huruf soal tes diperbesar dan dilaksanakan di ruangan tersendiri atau meja tersendiri menghadap dinding di dalam kelas untuk mengurangi distraksi. Siswa diingatkan untuk tetap tenang, membaca soal secara berulang dan perlahan-lahan, dan tetap mengerjakan soal apabila terlihat melamun atau hilang konsentrasi. Untuk mempertahankan konsentrasi, siswa diperbolehkan untuk memakai alat bantu yang tidak mengganggu siswa lain dan yang telah direkomendasikan oleh tenaga ahli seperti penggunaan headphone jika diperlukan.⁵⁰

48 Bandi, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. (Bandung: Aditama, 2006), 24.

49 Educational Support Department (2010). *Handbook 2009-2011*.

50 Educational Support Department (2010). *Handbook 2009-2011*.

Siswa ABK kelompok regular modifikasi, soal tes tertulis yang sudah dibuat oleh guru PAI harus dimodifikasi oleh guru pendamping (yang berlatar belakang S1 Pendidikan Luar Biasa). Soal modifikasi yang sudah direview tersebut dengan menebalkan dan atau menggarisbawahi kata kunci, menyederhanakan kalimat soal, mengurangi jumlah soal, mengurangi tingkat kesulitan soal, dan menerjemahkan tulisan menjadi soal gambar. Sedangkan siswa ABK kelompok individual, soal tes dimodifikasi secara fleksibel sesuai dengan materi yang dipelajari sesuai kurikulum yang digunakan. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi siswa ABK di kelas inklusi.

Mendidik anak yang berkelainan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya, tidak sama seperti mendidik anak normal, sebab selain memerlukan suatu pendekatan yang khusus juga memerlukan strategi yang khusus. Hal ini semata-mata karena bersandar pada kondisi yang dialami anak berkelainan. Oleh karena itu, melalui pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik anak berkelainan, diharapkan anak berkelainan: (1) dapat menerima kondisinya, (2) dapat melakukan sosialisasi dengan baik, (3) mampu berjuang sesuai dibutuhkan, dan (5) menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Tujuan lainnya agar upaya yang dilakukan dalam rangka habilitasi maupun rehabilitasi anak berkelainan dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang tepat.⁵¹

Proses pelaksanaan evaluasi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku disekolah tersebut, jika sekolah tersebut memakai

51 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2006), h.23-24

kurikulum umum maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan anak pada umumnya, jika sekolah memakai kurikulum modifikasi maka pelaksanaan evaluasinya pun disesuaikan dengan kesepakatan sekolah tersebut. Dan jika memakai kurikulum yang diindividualisasikan maka pelaksanaan evaluasinya pun tergantung kesepakatan guru dan siswa.

Secara umum rintangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua katagori yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat kelainan tertentu, dan anak-anak yang berkelainan yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Setiap anak yang memiliki hambatan temporer maupun permanen memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor lingkungan, (2) faktor dalam diri anak sendiri, dan (3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Sesuai kebutuhan lapangan maka pada penelitian ini hanya dibahas secara singkat pada kelompok anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer.

Kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas inklusi harus terus ditingkatkan agar mencapai tujuan secara berkesinambungan. Guru diharapkan dapat lebih memahami kembali makna konsep penilaian hasil belajar di kelas inklusi. Hal ini bisa dilakukan melalui membaca buku referensi yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar di kelas inklusi, berdiskusi dan sharing dengan teman guru di sekolah, konsultasi dengan guru BK, guru pendamping khusus, selain itu guru perlu mengikuti berbagai kegiatan

pelatihan, sosialisasi, IHT, workshop, bimtek dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pendidikan inklusi.

3. Keunikan Pembelajaran di Kelas-kelas Inklusi yang terdapat di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil penelitian tentang keunikan pembelajaran di kelas inklusi disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Keunikan Pembelajaran di Kelas Inklusi

No	Kabupaten / Kota / Sekolah	Keunikan Pembelajaran di Kelas Inklusi
1	Kotabaru	
	SMAN 2 Kotabaru	Penanganan siswa sudah memiliki ruangan khusus, pembelajaran pun secara khusus, namun penanganan yang tergolong ringan karena siswa ABK kategori slow leaner
2	Tanah Bumbu	
	SMKN 2 Simpang Empat	Pembelajaran dilakukan secara umum, namun ada beberapa penanganan khusus kepada siswa ABK
	SMAN 1 Kusan Hilir	Saat mengajar, guru selalu mencoba sesuai dengan siswa ABK
3	Tanah Laut	
	SMA Negeri 1 Jorong	Pembelajaran disajikan lebih bervariasi, media lebih bervariasi
	SMAN 1 Bati-Bati	Pembelajaran dilakukan secara umum, namun ada beberapa penanganan khusus kepada siswa ABK

4	Banjar	
	SMAN 2 Martapura	Pembelajaran lebih disederhanakan untuk siswa ABK
	SMAN 1 Beruntung Baru	Pembelajaran bagi siswa ABK perlu lebih perhatian
	SMKN 1 Gambut	Pembelajaran secara umum bagi siswa reguler, dan secara khusus bagi siswa ABK
5	Barito Kuala	
	SMAN 1 Rantau Badauh	Pembelajaran perlu penanganan khusus bagi siswa ABK
	SMAN 1 Tamban	Pembelajaran bagi siswa ABK perlu pendampingan khusus
6	Banjarbaru	
	SMK Negeri 1 Banjarbaru	Pembelajaran lebih menarik, siswa reguler dan siswa ABK saling membantu. Siswa ABK percaya dirinya tinggi, seperti ikut paskibra. Namun sebagian pembelajaran terganggu, karena konsentrasi yang lain hilang karena adanya siswa ABK.
	SMAN 4 Banjarbaru	Pembelajaran siswa ABK lebih sering tidak paham, sehingga perlu penjelasan lebih detail
7	Banjarmasin	
	SMA Negeri 4 Banjarmasin	Ada siswa ABK terlalu aktif dan mengganggu temannya saat pembelajaran
	SMKN 2 Banjarmasin	Ada siswa ABK yang berbicara sendiri, dan suka mengganggu temannya
	SMA 1 PGRI Banjarmasin	Ada siswa ABK yang sangat jujur (polos), berbicara apa adanya
8	Balangan	
	SMAN 1 Paringin	Belum ada (inklusi ringan saja)
	SMAN 1 Tebing Tinggi	Keterbatasan belajar siswa yang bersangkutan, dan pemalu berlebihan. Ada orang tua yang bersangkutan tidak mau anaknya dikhususkan sebagai anak lambat belajar

9	Tapin	
	SMAN 1 Binuang	
10	Hulu Sungai Utara	
	SMAN 1 Danau Panggang	Ketergantungan obat-obatan, sampai melibatkan pihak polisi dan puskesmas (sudah berhenti). Sebagian siswa ABK yang lain tergolong slowleaner dengan perlu perhatian khusus untuk guru
	SMKN 1 Amuntai	Untuk saat ini belum ada siswa ABK yang tergolong berat
11	Hulu Sungai Tengah	
	SMAN 4 Barabai	Ada siswa ABK hiperaktif sampai mengganggu pembelajaran, ada siswa ABK yang memiliki emosional tinggi sehingga mengakibatkan permasalahan dengan siswa regular, ada siswa yang dibully oleh siswa regular tanpa bicara tapi nangis sampai pulang kerumah dia ngamuk dikamarnya. Keunikan yang lain ada siswa ABK yang memiliki kepribadian dan tutur kata lebih sopan dan santun dibanding siswa regular. Ada siswa ABK yang percaya dirinya sangat tinggi misalnya ingin ikut paskibra namun memiliki keterbatasan/lambat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Ada siswa ABK yang percaya diri saat setiap upacara senin dia sebagai pelapor kelas.
	SMAN 1 Barabai	Inklusi ringan saja
12	Hulu Sungai Selatan	
	SMAN 2 Kandangan	Ada siswa ABK yang memiliki bakat dan sangat senang bidang olahraga. Sehingga setiap kegiatan olahraga meski kelas lain yang sedang olahraga dia ingin ikut. Sehingga dia meninggalkan kelasnya, mengakibatkan pembelajarannya terganggu.

13	Tabalong	
	SMAN 1 Tanta	Untuk siswa ABK soal yang dibuat lebih ringan disaat dalam kelas
	SMAN 1 Tanjung	Memiliki kelas khusus dengan jumlah siswa ABK 30 orang. Namun ada siswa ABK yang belajar dengan mandiri, sehingga tidak perlu dimasukkan di kelas khusus.

Berdasarkan temuan diatas, bahwa banyak keunikan pembelajaran di kelas inklusi, diantaranya adalah ada sebagian sekolah inklusi yang pembelajarannya lebih menarik, siswa regular dan siswa ABK saling membantu. Siswa ABK percaya dirinya tinggi, seperti ikut paskibra. Namun sebagian pembelajaran terganggu, karena konsentrasi yang lain hilang karena adanya siswa ABK. Ada juga temuan di sekolah inklusi yang siswa ABK memiliki ketergantungan dengan obat-obatan, sampai melibatkan pihak polisi dan puskesmas (sudah berhenti). Sebagian siswa ABK yang lain tergolong slowleaner dengan perlu perhatian khusus untuk guru.

Melalui pendidikan inklusi diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya. Tujuannya adalah agar tidak ada khusus dapat memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Tujuan dari semua upaya menuju pendidikan inklusi adalah kesejahteraan anak berkebutuhan khusus baik secara *permanen* maupun *temporer* untuk memperoleh pendidikan dan segala haknya sebagai warga negara. Sedangkan apakah penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler saat ini benar-benar baik bagi kesejahteraannya, hal ini membutuhkan waktu untuk membuktikannya, tetapi kita dapat percaya itu akan terjadi selama mereka diberi kesempatan dan dukungan

yang tepat sebagaimana dirancang bagi mereka. Hingga saat ini yang tampak pasti adalah jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah telah meningkat, sehingga target untuk mewujudkan pendidikan untuk semua pada tahun 2015 tampaknya menjadi lebih realistis⁵².

Selain itu, dari temuan penelitian ada sekolah inklusi yang siswa ABK yang hiperaktif sampai mengganggu pembelajaran, ada siswa ABK yang memiliki emosional tinggi sehingga mengakibatkan permasalahan dengan siswa regular, ada siswa yang dibully oleh siswa regular tanpa bicara tapi nangis sampai pulang kerumah dia ngamuk dikamarnya. Keunikan yang lain ada siswa ABK yang memiliki kepribadian dan tutur kata lebih sopan dan santun dibanding siswa regular. Ada siswa ABK yang percaya dirinya sangat tinggi misalnya ingin ikut paskibra namun memiliki keterbatasan/lambat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Ada siswa ABK yang percaya diri saat setiap upacara senin dia sebagai pelapor kelas.

Lain halnya temuan di sekolah inklusi lainnya yaitu ada siswa ABK yang memiliki bakat dan sangat senang bidang olahraga. Sehingga setiap kegiatan olahraga meski kelas lain yang sedang olahraga dia ingin ikut. Sehingga dia meninggalkan kelasnya, mengakibatkan pembelajarannya terganggu. Ada juga sekolah inklusi yang sudah memiliki kelas khusus dengan jumlah siswa ABK 30 orang. Namun ada siswa ABK yang belajar dengan mandiri, sehingga tidak perlu dimasukkan di kelas khusus.

Keunikan-keunikan pembelajaran di kelas inklusi yang telah dipaparkan diatas adalah membuktikan pentingnya program

52 Lilik Maftuhatin, Prodi. Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang RELIGI, Vol. V, No. 1 Volume 6, Nomor 2, Oktober 2014.

pendidikan inklusi yang harus ditingkatkan, khususnya pada pembelajaran PAI di kelas inklusi. Perlunya kerjasama berbagai pihak untuk melakukan penanganan yang benar. Materi PAI di kelas inklusi harus disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Bagi siswa ABK yang memiliki intelegensi diatas normal, materi dapat diperluas atau diperdalam dengan menambah materi baru yang harus disesuaikan dengan bakat. Siswa ABK yang memiliki intelegensi relatif normal dapat dipertahankan atau diturunkan tingkat kesulitannya. Sedangkan siswa ABK yang memiliki intelegensi di bawah normal (tunagrahita/anak lamban belajar) maka materi PAI dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya dengan disesuaikan dengan kemampuan siswa, atau bisa dihilangkan beberapa bagian tertentu.⁵³ Selain itu, pemilihan media, bahan ajar, LKS, sumber belajar yang sesuai juga penting diperhatikan agar proses pembelajaran PAI di kelas inklusi bisa optimal.

Secara konseptual model pendidikan inklusi menjanjikan sejumlah keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, hal ini dimungkinkan karena anak dapat memperoleh pendidikan pada sekolah manapun yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Di sisi lain, model pelayanan pendidikan seperti ini juga dianggap lebih efisien karena tidak perlu mendirikan sekolah khusus bagi mereka. Pendidikan Inklusif juga memungkinkan anak untuk belajar sosial dan emosi secara lebih wajar. Di sisi lain model ini juga akan mendorong siswa lain yang normal untuk belajar menghargai dan menerima anak-anak dengan kekurangan tersebut.⁵⁴

53 Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. Jogyakarta: Ar Ruzz Media.

54 Smith J. David, *Inklusi Sekolah ramah Untuk Semua*, (terj.) Sugiarmim

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti dalam hal-hal meliputi proses perekrutan input, klasifikasi tenaga pendidik, proses pembelajaran (tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi) yang tercakup dalam kurikulum, lingkungan pendidikan, output, serta faktor pendukung (sarana prasarana dan dana). Hal ini tentu sejalan dengan penelitian Kurniasari, Desi (2017) melaporkan bahwa Model evaluasi CIPP pada program pembelajaran PAI kelas VIII pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo adalah sebagai berikut: (1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) meliputi identifikasi peserta didik inklusif yang dilakukan dengan mengobservasi anak ketika pembelajaran, baik pada anak reguler maupun pada anak inklusif, (2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) meliputi penyusunan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, (3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) meliputi proses belajar mengajar sesuai dengan program pembelajaran, (4) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) meliputi diteruskan atau tidaknya program pembelajaran.⁵⁵

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu/integrasi. Pada pendidikan inklusi anak dilayani sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua berusaha untuk dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, prasarana dan sarana, guru, sistem pembelajaran sampai dengan sistem evaluasi pembelajarannya. Pendidikan inklusi juga tidak fokus pada pendidikan di sekolah tetapi mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, non formal

(Bandung: Nuansa, 2006)

55 Desi Kurniasari, Januari 2017, *Evaluasi Program Pembelajaran PAI pada Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo*, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta.

lainnya karena proses pendidikan anak tidak berhenti dan tidak cukup di sekolah saja.

Hasil temuan Sulihandari (2013) melaporkan bahwa sekolah yang ditunjuk mengadakan layanan pendidikan inklusi berhak melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian, baik dalam hal kurikulum, sarana, dan prasarana, tenaga pendidikan, sistem pembelajaran serta sistem penilaiannya. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam berbasis inkuiri tidak terlepas dari komponen-komponen pembelajaran, yaitu kurikulum, pendidik, anak didik, materi, metode, media dan evaluasi. Kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 1 Sewon adalah KTSP dengan modifikasi. Selain itu, kendala guru PAI dalam menerapkan PAI berbasis inklusi bagi tunanetra yaitu kurangnya ketrampilan guru dalam mengajar kelas inklusi, perhatian guru yang terbagi menjadi dua, keterbatasan waktu, dan keterbatasan media yang dimiliki sekolah serta perlunya sikap hati-hati dalam menyampaikan materi pelajaran untuk menjaga perasaan tunanetra.⁵⁶

Oleh karena itu, pendidikan inklusi memerlukan penyesuaian dan fleksibilitas di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, pengajaran, sosial, perilaku dan budaya. Kaitannya dengan proses pembelajaran pelaksanaan pendidikan inklusi disesuaikan dan fleksibel dengan hal-hal sebagai berikut; kurikulum, pendekatan dan proses pembelajaran, serta sistem evaluasi.

Setiap pembelajaran tentu ada keunikannya tersendiri, baik itu dari segi kelebihan ataupun kekurangan, begitu juga pembelajaran PAI di kelas inklusi. Pembelajaran di kelas inklusi

⁵⁶ Sulihandari, Hartanti. (2013). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Inklusi bagi Siswa Tunanetra di SMA Negeri 1 Sewon Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: jurusan PAI FAK. Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. (<http://digilib.uin-suka.ac.id/7553/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>).

menjadi suatu tantangan bagi guru, siswa inklusi maupun siswa regular. Siswa inklusi akan belajar berbaur dalam kehidupan normal masyarakat atau sekolah, bahkan mereka belajar menyesuaikan diri meskipun mereka memiliki hambatan fisik dan sosial pada lingkungan yang tidak kondusif. Karena tentu saja, siswa regular bisa memahami keberadaan siswa inklusi. Namun, di kelas inklusi siswa regular belajar memahami bahwa semua siswa harus memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, dan merekapun juga belajar berbagi tempat kepada siswa inklusi dan mampu membantu dengan keterbatasan siswa inklusi. Guru pun harus belajar menciptakan suasana yang kondusif di kelas inklusi, sabar untuk membimbing siswa inklusi, dan mengajak siswa regular untuk saling membantu, menghargai, dan mengormati segala perbedaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang Implementasi Instrumen Evaluasi Pembelajaran PAI di Sekolah (Studi Kasus pada Kelas Inklusi se Kalimantan Selatan) antara lain adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 telah menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang memelopori pendidikan inklusi, maka upaya pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Selatan melakukan pendekatan sistem sebagai langkah mensukseskan program pendidikan inklusi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi, membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi (FKPI) Kabupaten/ Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan, dan menentukan sekolah piloting penyelenggara pendidikan inklusi. dan sekolah inklusi. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan program beasiswa bagi guru honorer yang bekerja sama dengan Program Studi Pendidikan Luar Biasa (Prodi PLB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).
2. Hasil kerjasama ULM prodi S1 PLB dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, memiliki lulusan program S1 PLB yang sebagian statusnya sebagai guru honorer di

sekolah inklusi piloting. Hal ini tentu sangat membantu program pendidikan inklusi disekolah tersebut, dengan menjadikan para alumni sebagai Guru Pendamping Khusus (GPK). Namun tidak semua sekolah inklusi piloting ataupun sekolah inklusi memberdayakan mereka sebagai GPK, dikarenakan berbagai hal. Salah satunya karena pihak dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi tidak memberikan wewenang kepada pihak sekolah untuk GPK tersebut, selain itu tentu terkait dengan honor yang akan dibebankan kepada pihak sekolah, sehingga sekolah enggan menugaskan sebagai GPK.

3. Ada beberapa sekolah inklusi di Kalimantan Selatan sudah cukup baik dalam menjalankan program inklusi yang merupakan kebijakan pemerintah, yang memiliki siswa ABK dan telah didukung sarana dan prasarana yang sudah diperbantukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Namun, saat ini siswa ABK yang ada di sekolah tersebut masih belum menggunakan alat-alat bantu tersebut karena masih tergolong siswa ABK yang ringan. Sekolah inklusi masih perlu terus ditingkatkan dari seluruh aspek guna mendukung terlaksanakannya program pendidikan di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan optimal.
4. Instrumen evaluasi pembelajaran PAI di kelas-kelas inklusi secara umum masih belum ada dibuat oleh guru PAI. Hal ini tentu terkait dengan kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum umum. Sehingga para guru PAI masih menggunakan perangkat RPP dan penilaian dengan menggunakan kurikulum umum tanpa dimodifikasi. Guru PAI menggunakan instrumen evaluasi yang umum, artinya instrumen evaluasi sama digunakan untuk siswa reguler ataupun siswa ABK. Perlu dilakukan

pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran PAI modifikasi melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi/IHT/workshop/bimtek.

5. Secara umum sekolah inklusi di Kalimantan Selatan masih menggunakan kurikulum umum, namun ada beberapa sekolah menggunakan kurikulum modifikasi, dan ada beberapa kasus dilakukan penanganan secara individual seperti ditemukan di SMKN 1 Banjarbaru, SMAN 1 Danau Panggang, dan SMAN 4 Barabai.
6. Ada beberapa sekolah sebagian sudah melakukan penanganan secara individual. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan keistimewaan yang harus dimodifikasi. Dengan kata lain, siswa ABK di kelas inklusi belajar bersama dengan siswa reguler dalam berbagai kegiatan proses belajar berlangsung. Hal ini tentu tidak lepas dari bimbingan guru mata pelajaran. Sedangkan guru pendamping khusus apabila jika beberapa kondisi tertentu yang tidak dapat diikuti oleh siswa ABK tersebut maka perlu melakukan penanganan individual.
7. Berdasarkan temuan secara umum belum tersedianya raport khusus siswa ABK. Penggunaan raport masih secara umum, namun ada beberapa kasus untuk siswa ABK di raportnya sesuai dengan KKM. Laporan tertulis tentang hasil evaluasi dan penilaian PAI di kelas inklusi dituangkan dalam raport siswa secara umum seperti halnya siswa reguler. Namun perlu ditambahkan raport narasi yang telah disesuaikan bagi siswa ABK.
8. Keunikan pembelajaran di kelas inklusi, diantaranya adalah ada sebagian sekolah inklusi yang pembelajarannya lebih menarik, siswa reguler dan siswa ABK saling membantu. Siswa ABK percaya dirinya tinggi, seperti

ikut paskibra. Namun sebagian pembelajaran terganggu, karena konsentrasi yang lain hilang karena adanya siswa ABK. Ada juga temuan di sekolah inklusi yang siswa ABK memiliki ketergantungan dengan obat-obatan, sampai melibatkan pihak polisi dan puskesmas (sudah berhenti). Sebagian siswa ABK yang lain tergolong slowleaner dengan perlu perhatian khusus untuk guru.

9. Ada sekolah inklusi yang siswa ABK yang hiperaktif sampai mengganggu pembelajaran, ada siswa ABK yang memiliki emosional tinggi sehingga mengakibatkan permasalahan dengan siswa regular, ada siswa yang dibully oleh siswa regular tanpa bicara tapi nangis sampai pulang kerumah dia ngamuk dikamarnya. Keunikan yang lain ada siswa ABK yang memiliki kepribadian dan tutur kata lebih sopan dan santun dibanding siswa regular. Ada siswa ABK yang percaya dirinya sangat tinggi misalnya ingin ikut paskibra namun memiliki keterbatasan/lambat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Ada siswa ABK yang percaya diri saat setiap upacara senin dia sebagai pelapor kelas.
10. Ada siswa ABK yang memiliki bakat dan sangat senang bidang olahraga. Sehingga setiap kegiatan olahraga meski kelas lain yang sedang olahraga dia ingin ikut. Sehingga dia meninggalkan kelasnya, mengakibatkan pembelajarannya terganggu. Ada juga sekolah inklusi yang sudah memiliki kelas khusus dengan jumlah siswa ABK 30 orang. Namun ada siswa ABK yang belajar dengan mandiri, sehingga tidak perlu dimasukkan di kelas khusus.
11. Keunikan-keunikan pembelajaran di kelas inklusi membuktikan pentingnya program pendidikan inklusi yang harus ditingkatkan, khususnya pada pembelajaran

PAI di kelas inklusi. Perlunya kerjasama berbagai pihak untu melakukan penangan yang benar.

B. Saran

Beberapa saran untuk penelitian mengenai Implementasi Instrumen Evaluasi Pembelajaran PAI di Sekolah (Studi Kasus pada Kelas Inklusi se Kalimantan Selatan) adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah disarankan untuk melanjutkan program pembinaan terhadap para GPK.
2. Para GPK yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) agar segera didistribusikan ke sekolah-sekolah yang memiliki kelas-kelas inklusi.
3. Khusus untuk guru-guru PAI diharapkan dapat mengimplementasikan instrumen evaluasi bagi ABK di kelas-kelas inklusi.
4. Sekolah dengan bantuan pemerintah perlu melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran yang khusus untuk ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandhi. 2006. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung: Aditama.
- Chatib, Munif. 2012. Sekolah Anak-anak Juara. Bandung: Kaifa.
- Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publications, Inc.
- David, Smith J. 2006. Inklusi Sekolah ramah Untuk Semua, (terjemahan) Sugiarmen. Bandung: Nuansa.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB). 2009. Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Educational Support Department. 2010. Handbook 2009-2011.
- Gunawan, Heri. 2012. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Bandung: Alfabeta.
- Hamidah, Ani Mar'atul. 2015. Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Setting Inklusi di SDN Lemahputro 1 Sidoarjo. *Didaktika Religia*, Vol. 3, No. 2.
- Harjanto. 2006. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryati, Nik. 2011. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Bandung: Alfabeta.
- Haryono, dkk. 2015. Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 32, No. 2.

- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Ismail. 2011. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. Semarang: Media Group.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Kemendiknas.
- Kurniasari, Desi. 2017. Evaluasi Program Pembelajaran PAI pada Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo, Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta.
- Mamah, Rohmah Siti. 2010. PAI dalam Setting Pendidikan Inklusif, Tesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Maftuhatin, Lilik. 2014. Prodi. Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang. *RELIGI*, Vol. V, No. 1 Vol. 6, No. 2.
- Mujib, Abdul, dan Jusuf Mudzakkir. 2006. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rifani, Latifa Garnisti. 2016. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, Skripsi, UNY, Yogyakarta.
- Rohail, Aidan. Kurikulum dan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Diakses dari: www.kurikulum-dan-pendidikan-inklusif-bagi.html, pada 7 Juni 2021.
- Saputra, Angga. 2016. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age Jurnal Ilmiah*

Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No.3 September 2016. (file:///C:/Users/user/Downloads/1929-49-4128-1-10-20180705.pdf).

Situmorang, Jamisten. 2008. Pendidikan Inklusi. Diakses dari: <https://jamisten.wordpress.com/2008/12/10/pendidikan.inklusi>, pada 10 Maret 2021.

Sukmawati, A. 2014. Pembelajaran PAI pada Anak Berkebutuhan Khusus di SD Islam Al Azhaar Tulungagung, Skripsi.

Sunanto, Juang. 2009. Indeks Insklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang terdapat ABK di Sekolah Dasar. *Jurnal JASSI: Anakku*, Vol. 8, No. 2.

Sunanto, Juang. 2012. Media Dunia Disabilitas. *Diffa*.

Wibowo, Hendro Sugiyono. 2015.

Yuyus. 2005. Adaptasi Pembelajaran Siswa Berkesulitan Belajar. Bandung: Rizqi.

Sumber website:

<https://kumparan.com/banjarhits/2-ribu-anak-difabel-di-kalsel-butuh-sekolah-inklusif>.



Antasari Press
Jl. A.Yani KM.4,5 Banjarmasin
Kalimantan Selatan

